



BUPATI SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menyusun rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

6. Peraturan .

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM.
2. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
3. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
4. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
5. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
6. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak.
7. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
8. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

M10. Rencana . *Am* ✓

10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
16. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
17. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.

BAB II PENDATAAN, PEMUTAKHIRAN DAN SINKRONISASI DATA

Pasal 2

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik.
- (2) Pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan selaku sekretaris tim penerapan SPM dan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, yang terdiri dari:
 - a. jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya;
 - b. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia dan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
 - c. jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk format pengumpulan data terhadap urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Renaksi Penerapan SPM.
- (5) Pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui verifikasi data dari perangkat daerah yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil selaku anggota Tim Penerapan SPM bersama dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

BAB III INTEGRASI SPM

MPasal 3 .am ✓

Pasal 3

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar memprioritaskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar ke dalam dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Wakil Ketua Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar terintegrasi ke dalam dokumen RKPD dan Renja PD.

Pasal 4

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen APBD.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Wakil Ketua Tim Penerapan SPM dan Badan Keuangan Daerah selaku anggota Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah terintegrasi ke dalam APBD dan memastikan tercatat sampai ke dalam dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

BAB IV STRATEGI PENERAPAN SPM

Pasal 5

- (1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dan melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM.
- (2) Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat selaku sekretaris Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.
- (3) Inspektorat selaku anggota Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perumusan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode 5 (lima) tahun.
- (5) Tim Penerapan SPM melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. Pertemuan atau rapat koordinasi secara berkala setiap triwulan;
 - b. Bimbingan teknis Penerapan SPM;
 - c. Pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. Konsultasi Penerapan SPM.
- (6) Langkah operasional dan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM;
 - c. Bab III Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM;
 - d. Bab IV Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM; dan
 - e. Bab V Kesimpulan dan Saran.
- (7) Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM pada ayat (6) dituangkan dalam matriks Renaksi Penerapan SPM antara lain:
 - a. program, kegiatan dan sub kegiatan;

Mb. indikator .(M) ✓

- b. indikator kinerja jenis pelayanan dasar terhadap penerima layanan dasar dan mutu layanan dasar yang tidak terpenuhi;
 - c. tahun dasar pelaksanaan;
 - d. pencapaian SPM;
 - e. inisiasi;
 - f. sumber pendanaan; dan
 - g. instansi pelaksana.
- (8) Langkah operasional dan strategi Penerapan SPM memuat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan sosialisasi.
- (2) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyampaikan strategi dan rencana program kegiatan pemenuhan SPM pada tahun anggaran berjalan dan tahun berikutnya.
- (3) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat selaku sekretaris tim penerapan SPM dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melalui pemanfaatan media lokal yang mudah diakses masyarakat dan forum-forum kemasyarakatan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan konsolidasi sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran daerah.
- (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (3) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan SPM memprioritaskan pembiayaan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal APBD tidak mencukupi pembiayaan Penerapan SPM, Tim Penerapan SPM mengupayakan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat desa selaku anggota tim penerapan SPM, dapat menganggarkan pembiayaan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan SPM dapat mengupayakan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kerja sama dengan daerah lain, kerja sama dengan pihak ketiga, kerja sama dengan Badan Usaha, mengusulkan pembiayaan dari APBN dan upaya lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap triwulan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan Penerapan SPM tahun berikutnya.

M Pasal 9. M ✓

Pasal 9

- (1) Tim Penerapan SPM menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan selaku sekretaris tim penerapan SPM dan dikonsolidasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hubungan masyarakat dan dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 10

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pencapaian berdasarkan laporan Penerapan SPM.
- (2) Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat selaku sekretaris tim penerapan SPM melakukan analisis Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada triwulan empat.
- (3) Hasil analisis laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai rekomendasi kebijakan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 11

- (1) Bagian Pemerintahan selaku sekretaris tim Penerapan SPM melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>.
- (2) Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara triwulan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba
pada tanggal 3 Oktober 2025
BUPATI SABU RAIJUA

KRISMAN B. RIWU KORE

Diundangkan di Seba
pada tanggal 3 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA,


SEPTENIUS M. BULE LOGO

BERITA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2025 NOMOR 27

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN
SABU RAIJUA TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan urusan wajib pelayanan dasar dengan prinsip otonomi yang dilaksanakan secara nyata dan bertanggung jawab.

Penanganan urusan pemerintahan tersebut dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan Daerah dan dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah tersebut dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang akan dicapai dengan melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu bentuk perwujudan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah dengan menyusun Renaksi Penerapan SPM Daerah dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah.

SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme Penerapan SPM. SPM diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Daerah menerapkan SPM dengan tujuan peningkatan pelayanan prima menuju *Good Governance*.

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1.2.1 Maksud

Maksud penyusunan Renaksi Penerapan SPM adalah sebagai komitmen Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan penganggaran SPM setiap tahun, memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan Penerapan SPM tertuang dalam dokumen perencanaan Daerah, langkah-langkah konkrit dalam pemenuhan SPM dan alat melaksanakan pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM di Daerah.

1.2.2 Tujuan

Renaksi ini bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi di berbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan M efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. M

1.2.3 Sasaran

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik.

1.3. Kondisi Umum Wilayah

1.3.1 Luas Wilayah dan Batas Wilayah

Kabupaten Sabu Raijua memiliki luas wilayah sebesar 459,58 km². Wilayah administrasi Kabupaten Sabu Raijua terdiri dari 4 pulau yaitu Pulau Sabu, Pulau Raijua, Pulau Dana dan Wadu Mea. Pulau Sabu dan Raijua merupakan pulau yang berpenghuni sedangkan Pulau Dana dan Wadu Mea merupakan pulau yang tidak berpenghuni.

Batas geografis Kabupaten Sabu Raijua adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Sawu
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Barat : Laut Sawu
- Sebelah Timur : Laut Sawu

Jumlah kecamatan di Kabupaten Sabu Raijua sebanyak 6 (enam) kecamatan. Jumlah seluruh desa/kelurahan adalah 63 (enam puluh tiga) yang terdiri 58 desa dan 5 kelurahan.

1.3.2 Topografi

Ditilik dari kelerengan (slope), sebagian besar wilayah Sabu Raijua tergolong sebagai daerah yang datar s/d landai dengan kelas lereng 0-8% (luas 25.451,28 ha atau 55.23%) dan 9-15% (luas 10.422,92 ha atau 22.62%). Jika ditilik dari persebaran kelas lereng per Kecamatan menunjukkan bahwa Kecamatan Sabu Barat, Sabu Tengah dan Hawu Mehara akan memiliki kelas lereng yang tergolong curam (26-40%) s/d sangat curam (>41%) paling luas dibandingkan Kecamatan lainnya secara berturut-turut.

Secara umum wilayah Kabupaten Sabu Raijua berada pada elevansi dari 0 s/d 343 meter serta didominasi area dengan ketinggian tempat (elevansi) 0-100 meter dengan luasan kumulatif 27.839,76 ha atau dengan presentase 60.41% dari keseluruhan wilayah. Kecuali Sabu Barat dan Sabu Tengah, maka Kecamatan lain di wilayah Kabupaten Sabu Raijua tidak memiliki elevansi sampai maksimum 300-350 meter.

1.3.3 Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Sabu Raijua sampai dengan akhir tahun 2024 sebanyak 94.860 jiwa, terdiri dari 48.349 penduduk laki-laki dan 46.511 penduduk perempuan. Jumlah penduduk Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 menurut Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sabu Barat	18.247	17.460	35.707
2	Sabu Tengah	4.772	4.569	9.341
3	Sabu Timur	4.845	4.669	9.514
4	Sabu Liae	5.567	5.353	10.920
5	Hawu Mehara	10.136	9.780	19.916
6	Raijua	4.782	4.680	9.462
	JUMLAH	48.349	46.511	94.860

1.3.4 Kawasan Rawan Bencana

a) Kekeringan

Dari dua dokumen analisa dan dua sumber data yang digunakan, semuanya menunjukkan bahwa kekeringan adalah kejadian bencana yang paling sering terjadi dan dengan dampak yang paling luas. Data DIBI mencatat satu kali kejadian kekeringan yang melanda Kabupaten Sabu Raijua dan menyebabkan 13.733 jiwa terkena dampak.

Analisa dalam RTRW Kabupaten Sabu Raijua menunjukkan bahwa seluruh kabupaten rawan terhadap bencana kekeringan. Analisa dalam RPB Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa jenis bencana dengan tingkat ancaman tinggi yang cakupannya wilayahnya paling luas adalah kekeringan. Hasil pengumpulan data primer melalui diskusi kelompok terfokus dan survei lapangan menunjukkan bahwa kekeringan dialami oleh semua desa di setiap kecamatan, dan bahkan terjadi setiap tahun di Mehara dan Raijua.

Ada 2 (dua) dampak utama yang dialami oleh masyarakat karena kekeringan. Pertama adalah kekurangan air yang ditandai dengan berkurangnya air permukaan, baik di sungai, sumur gali dan embung-embung. Kekurangan air bersih ini juga sering menyebabkan berbagai jenis penyakit, terutama penyakit kulit dan diare. Dampak kedua adalah gagal panen karena kekeringan pertanian, karena mayoritas pertanian di Kabupaten Sabu Raijua adalah pertanian lahan kering yang mengandalkan air hujan. Kekeringan menyebabkan tanaman pangan seperti padi, jagung, sorgum dan bahkan kacang-kacangan tidak bisa ditanam atau tidak bisa dipanen. Akibatnya, masyarakat mengalami kekurangan pangan dan biasanya disubstitusi dengan gula nira yang memang telah menjadi bagian dari sistem ketahanan pangan di Kabupaten Sabu Raijua.

b) Kebakaran Hutan dan Lahan

Bencana kebakaran, yakni kebakaran hutan dan lahan, merupakan bencana yang dialami hampir secara merata di Kabupaten Sabu Raijua, terutama pada saat persiapan lahan melalui aktivitas pembersihan lahan (*land clearing*) untuk pembukaan lahan ladang/kebun sebelum diakhir musim kemarau atau memasuki musim penghujan (*late-season burning*) serta di tunjang oleh musim kemarau yang Panjang serta panas yang ekstrim. Walaupun DIBI tidak mencatat adanya kejadian kebakaran di Kabupaten Sabu Raijua, tetapi analisa ancaman dipaparkan dalam RPB Provinsi NTT menunjukkan ada 45.198 ha lahan di Kabupaten Sabu Raijua yang memiliki ancaman kebakaran tinggi. Demikian juga dalam diskusi kelompok terfokus, masyarakat terjadi kebakaran di semua kecamatan di Kabupaten Sabu Raijua.

Kebakaran berdampak pada kehilangan harta benda dan hunian, serta kehilangan sumber pangan dan pendapatan. Dalam peristiwa kebakaran lahan dan hutan, seringkali yang terbakar adalah tanaman lontar yang memang merupakan tanaman dominan dan menjadi ciri khas Pulau Sabu dan Raijua. Tanaman ini tidak saja menjadi andalan konservasi, tetapi terutama merupakan sumber pangan (setelah nira dimasak menjadi gula) dan juga sumber pendapatan dari produk-produk lainnya. Selain itu, pohon kelapa juga sering terbakar yang menyebabkan kerugian ekonomi.

c) Cuaca Ekstrem (angin kencang)

DIBI tidak mencatat adanya kejadian angin kencang, termasuk puting beliung, di Kabupaten Sabu Raijua, tetapi berbagai sumber lain menunjukkan adanya ancaman tersebut dan sejarah kejadiannya.

Analisa dalam dokumen RTRW menunjukkan bahwa 32 persen wilayah Kabupaten Sabu Raijua rawan puting beliung dan sekurangnya dua desa pernah mengalaminya. Sementara diskusi kelompok terfokus menunjukkan bahwa masyarakat mencatat kejadian cuaca ekstrim di semua kecamatan, bahkan setiap tahun masyarakat di Kecamatan Sabu Raijua mengalami cuaca ekstrim.

Dampak dari bencana angin kencang terutama adalah kerusakan rumah masyarakat. Walaupun tidak tercatat dalam dokumentasi bencana pada DIBI maupun BPBD, tetapi masyarakat mencatat dampak dari angin kencang, yakni merusak rumah masyarakat (dampak yang paling sering), merusak tambak garam masyarakat serta merusak kebun masyarakat.

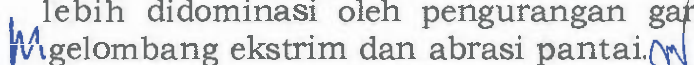
d) Banjir Yang Disertai Longsor

Walaupun beriklim cenderung kering, tetapi dengan kondisi tanah dan topografi yang ada, Kabupaten Sabu Raijua kerap mengalami bencana banjir dan banjir yang disertai tanah longsor. Website DIBI mencatat ada satu kejadian longsor. Dari dokumen RPB didapat informasi bahwa ada 1.812 ha luas lahan dengan tingkat ancaman tinggi terhadap banjir dan longsor, 16.350 ha dengan ancaman sedang dan 29.813 ha dengan ancaman rendah. Dokumen RTRW mencatat 3 kecamatan (Sabu Barat, Hawu Mehara dan Sabu Liae) sebagai kawasan rawan banjir dan longsor. Hal ini dikonfirmasi oleh informasi dari masyarakat bahwa dalam 20 tahun terakhir, Kecamatan Sabu Barat, Kecamatan Hawu Mehara dan Kecamatan Sabu Liae mengalami banjir dan longsor. Secara keseluruhan, ada 11 kejadian banjir dan longsor di Kecamatan Sabu Raijua dalam 20 tahun terakhir.

Banjir dan longsor berdampak luas pada kehidupan dan penghidupan masyarakat. DIBI mencatat bahwa dari satu kejadian longsor, ada 4 orang meninggal dan 9 lainnya luka-luka. Informasi dari masyarakat mencatat ada 5 korban jiwa, masing-masing di desa Depe, Ledekepaka dan Kelurahan Mebba (Kecamatan Sabu Barat) dan di desa Mehona, Kecamatan Liae. Selain korban jiwa, masyarakat juga mencatat kerusakan aset masyarakat seperti kebun pangan, sawah, tanaman lontar dan kelapa, tambak garam, dan hanyutnya ternak, serta kerusakan fasilitas umum seperti kantor desa, gereja, sekolah dan embung.

e) Gelombang Pasang dan Abrasi

Gelombang pasang dan abrasi di Kabupaten Sabu Raijua tidak dicatat, baik dalam DIBI, dalam dokumen RTRW, maupun dokumen RPB Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tetapi kejadian bencana gelombang pasang dan abrasi dirasakan langsung oleh masyarakat dan pernah dilaporkan kepada BPBD Kabupaten Sabu Raijua. Dalam diskusi kelompok terfokus, ada 45 kejadian gelombang pasang dan abrasi yang dicatat oleh masyarakat di 58 desa/kelurahan dalam 20 tahun terakhir. Hal ini diperkuat melalui *ground checking* yang menemukan beberapa bukti kejadian abrasi yang disebabkan gelombang ekstrim di berbagai titik pesisir di Sabu Raijua Gempa Bumi.

Hasil analisis menggunakan citra satelit multi-temporal (tahun 1996, 2008 dan tahun 2019) menggunakan metode *normalized difference water index (NDWI)* dan digitasi *on-screen* menunjukkan bahwa terdapat pengurangan panjang garis pantai di Kabupaten Sabu Raijua dari 134,66 km² pada tahun 1996, berkurang menjadi 132,54 km² pada tahun 2008 dan pada tahun 2019 kembali berkurang menjadi 131,67 km². Jika dilihat pola perubahan garis pantai terdapat penambahan garis pantai (akresi), akan tetapi dalam 20 tahun terakhir lebih didominasi oleh pengurangan garis pantai yang diduga akibat gelombang ekstrim dan abrasi pantai. 

f) Gempa Bumi

Gempa bumi belum menjadi bencana yang merusak dalam sejarah bencana di Kabupaten Sabu Raijua. Dari 58 desa yang terlibat dalam diskusi kelompok terfokus, tidak ada satupun yang menyampaikan adanya bencana gempa bumi dalam 20 tahun terakhir.

Dalam BMKG dalam Katalog Gempa Bumi Merusak dan Signifikan 1821-2018, mencatat beberapa gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, tetapi tidak satupun yang menimbulkan kerusakan dan kerugian di daerah Sabu Raijua. Demikian juga *website United States Geological Survey* (USGS) mencatat 52 kali gempa bumi yang berpusat di Laut Sawu tahun 1970-2018, tetapi tidak mencatat kerusakan dan kerugian yang timbul. Walaupun tidak ada informasi skala MMI, tetapi magnitudo sebagian besar kejadian gempa tersebut dibawah 5 Mb, sehingga bisa diduga bahwa sebagian besar gempa ini tidak menimbulkan kerusakan dan kerugian berarti.

g) Tsunami

Sama seperti gempa bumi, tsunami juga belum menjadi pengalaman bencana yang merusak di Kabupaten Sabu Raijua. Masyarakat belum pernah mengalami tsunami, juga tidak ada cerita orang tua tentang tsunami. BMKG dalam Katalog Tsunami Indonesia tahun 1966-2018, mencatat beberapa tsunami di Nusa Tenggara Timur, seperti di Flores, Alor dan Sumba, tetapi tidak ada yang mengena Kabupaten Sabu Raijua. Walau demikian, RPB Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan kajian tsunami di Kabupaten Sabu Raijua dan mengidentifikasi ada 2.999 ha daerah dengan ancaman tsunami tinggi, 2.775 ha dengan ancaman sedang dan 315 ha dengan ancaman rendah. Selain itu, mayoritas tsunami dipicu oleh gempa bumi, maka dengan posisi Kabupaten Sabu Raijua di dekat struktur Java Megthrust dalam segmen Nusa Tenggara Timur, membuat Kabupaten Sabu Raijua juga rawan terhadap ancaman tsunami.

1.3.5 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Nilai PDRB Kabupaten Sabu Raijua atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mencapai 1.732,6 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 94,08 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 1.638,53 miliar rupiah. Kenaikan nilai PDRB ini dipengaruhi membaiknya perekonomian setelah dampak pandemi Covid-19 dengan ditunjukkan oleh peningkatan aktivitas produksi dan adanya inflasi. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan, dari 862,56 miliar rupiah pada tahun 2024 menjadi 831,09 miliar rupiah pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan selama tahun 2024, Kabupaten Sabu Raijua mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi sekitar 3,79 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan PDRB ini disebabkan oleh keadaan ekonomi yang mulai berangsur membaik setelah dampak pandemi Covid-19.

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2020-2024) struktur perekonomian Kabupaten Sabu Raijua didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan Usaha, diantaranya:

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Konstruksi; dan Real Estat. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Sabu Raijua. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sabu Raijua pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, yang mencapai angka 34,83 persen (angka ini turun dibandingkan pada tahun 2020 yang sebesar angka 35,00 persen). Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 16,24 persen (naik dari 15,24 persen pada tahun 2020), disusul oleh Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 15,62 persen (turun dari 17,90 persen di tahun 2020). Berikutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 15,46 persen (turun dari 15,54 persen di tahun 2020) dan lapangan usaha Real Estat sebesar 7,37 persen (naik dari 6,68 persen di tahun 2020).

b) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Sabu Raijua pada tahun 2024 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di sebagian besar lapangan usaha karena pulihnya aktivitas ekonomi. Nilai PDRB Kabupaten Sabu Raijua atas dasar harga konstan 2024, mencapai 862,56 miliar rupiah. Angka tersebut naik dari 831,09 miliar rupiah pada tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2024 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 3,79 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum yang mencapai 11,23 persen diikuti oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yang mencapai pertumbuhan ekonomi 8,98 persen, Berikutnya lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas dengan 8,44 persen dan lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 8,07 persen. Keempat lapangan usaha tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen pada tahun 2024. Di Kabupaten Sabu Raijua, tidak ada yang mengalami kontraksi atau seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2024.

1.4. Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM

Renaksi Penerapan SPM Daerah disusun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM pada tahun sebelumnya (N-1) dalam pelaksanaannya tim penerapan SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategi yang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang harus dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM. Strategi tim penerapan SPM dalam menyusun Renaksi Penerapan SPM Daerah harus memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkup ekologi/lingkungan pembangunan di Kabupaten Sabu Raijua yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM. (M)

Pendekatan yang digunakan oleh tim Penerapan SPM dalam merumuskan Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat inisiasi yang berisi solusi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh tim Penerapan SPM dalam upaya memperbaiki capaian, sehingga rumusan strategi Renaksi Penerapan SPM Daerah yang disusun merupakan rangkaian hubungan yang saling berpengaruh antara kekuatan, kelemahan, dan peluang serta ancaman yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam menerapkan SPM di Daerah masing-masing.

Seiring dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 harus dipedomani oleh setiap Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penerapan SPM baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

BAB II
KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

2.1 Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM

Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Strategis, dalam Rencana Strategis Kabupaten Sabu Raijua 2025-2029 terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut:

2.1.1 Bidang Pendidikan

Tabel 2.1 Kondisi Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024

Kabupaten /Kota	SPM Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota										Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pendidikan Anak Usia Dini		Pendidikan Dasar		Pendidikan Kesetaraan		Pendidikan Kesetaraan		Pendidikan Kesetaraan			
	Usia 05 (Lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini	Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar	Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan	Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Capaian (%)	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kabupaten Sabu Raijua	3689	100,00 %	17969	100,00 %	22	100,00 %	22	100,00 %	22	100,00 %	53.463.218.991	26.567.694.251

Sumber data: laporan eSPM

2.1.2 Bidang Kesehatan

Tabel 2.2 Kondisi Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024

SPM Bidang Kesehatan (Kabupaten)																												
Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			Pelayanan Kesehatan Balita			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut									
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)							
Kabupaten Sabu Raijua	1.650	1.050	63,64%	1.650	1.207	73,15%	1.571	1.435	91,34%	7.274	7.032	96,67%	18.228	7.841	43,02%	58.176	27.564	47,38%	9.639	13.092	100,00%							
SPM Bidang Kesehatan (Kabupaten)														Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko/terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) Yang Bersifat Pencegahan/ Promotif dan Pencegahan/Preventif			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko/terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) Yang Bersifat Pencegahan/ Promotif dan Pencegahan/Preventif			Pagu Anggaran SPM (Rp)								
SPM Bidang Kesehatan (Kabupaten)														Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko/terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) Yang Bersifat Pencegahan/ Promotif dan Pencegahan/Preventif			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko/terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) Yang Bersifat Pencegahan/ Promotif dan Pencegahan/Preventif			Pagu Anggaran SPM (Rp)		
Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)					
16.665	2.544	15,27%	203	301	100%	78	97	100%	1.185	1.411	100%	1.683	1.828	92,07%	1.131.783.543	1.083.202.163	95,68%	1.131.783.543	1.083.202.163	95,68%	1.131.783.543	1.083.202.163	95,68%					

Sumber data: laporan eSPM

2.1.3 Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 2.3 Kondisi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024

Kabupaten/ Kota	SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota						Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pemenuhan Kebutuhan Air Minimum Sehari-Hari		Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik					
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kabupaten Sabu Raijua	2.475	2.475	100,00%	2.250	2.250	100,00%	13.008.411.435	11.586.257.227

Sumber data: laporan eSPM

2.1.4 Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 2.4 Kondisi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024

Kabupaten/ Kota	SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota						Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota		Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kabupaten Sabu Raijua	6	6	100,00%	0	0	(tidak ada relokasi)	310.525.800	310.525.800

Sumber data: laporan eSPMN

2.1.5 Bidang Ketenteraman, Keterlibatan Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.5 Kondisi Capaian SPM Bidang Trantubumlinmas di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024

Kabupaten /Kota	SPM Bidang Kesehatan (Kabupaten)												Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)			
	Pelayanan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum		Pelayanan Informasi Rawan Bencana		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran								
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)					
Kabupaten Sabu Raijua	45	45	100%	30	30	100%	25	25	100%	25	25	100%	54	54	100%	791,009,800	783,944,703

Sumber data: laporan eSPM

2.1.6 Bidang Sosial

Tabel 2.6 Kondisi Capaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024

Kabupaten/Kota	SPM Bidang Kesehatan (Kabupaten)												Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)			
	Pelayanan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum		Pelayanan Informasi Rawan Bencana		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran								
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)					
Kabupaten Sabu Raijua	38	38	100%	26	26	100%	110	110	100%	0	0	0%	96	96	100%	959,453,116	950,533,616

Sumber data: laporan eSPM

2.2 Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM

Dalam pencapaian penerapan SPM di Kabupaten Sabu Raijua ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

2.2.1 Urusan Pendidikan

Permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan Pendidikan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut:

1. Belum terpenuhinya rasio jumlah satuan pendidikan dengan jumlah pengawas sekolah.
2. Belum terpenuhinya kebutuhan/kekurangan sarana dan prasarana pendidikan, dalam rangka mengatasi daya tampung peserta didik dan peningkatan mutu proses pembelajaran di sekolah.
3. Berdasarkan Standar Kualifikasi tenaga pendidik secara formal di SD dan SMP masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S-1 dan belum bersertifikat (sertifikasi pendidik).

2.2.2 Urusan Kesehatan

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh, adalah sebagai berikut:


1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Target sasaran ibu hamil sebanyak 1.650 merupakan angka proyeksi. Dari angka proyeksi tersebut, ternyata jumlah ibu hamil pada tahun 2024 hanya 1.436, dengan kata lain jumlah ibu hamil lebih rendah dari angka proyeksi. Permasalahan lain adalah dari ibu hamil (1436) terdapat 44 yang abortus sehingga tidak mencapai K6. Selain itu terdapat sejumlah ibu hamil yang datang memeriksa kehamilan pada usia kehamilan lebih dari 3 (tiga) bulan sehingga ibu hamil yang memeriksakan kehamilan pada usia tersebut tidak bisa mencapai K6. Dari uraian di atas maka permasalahan tidak mencapai target pada pelayanan Kesehatan ibu hamil disebabkan 3 hal, yakni:

- a. Jumlah Proyeksi lebih tinggi dari sasaran riil;
- b. Adanya kejadian abortus (keguguran) yang menyebabkan tidak sampai pada tahap pemeriksaan K6;
- c. Pemeriksaan kehamilan pertama lebih dari usia kehamilan 3 bulan atau 12 minggu; dan
- d. Tinggi angka kehamilan di luar nikah sebanyak 189 orang dan kehamilan di remaja (16 tahun) ada 9 orang.

2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Sasaran ibu bersalin yang ditargetkan sejumlah 1.650 merupakan hasil proyeksi. Dari proyeksi tersebut, jumlah ibu melahirkan secara riil adalah 1.397 orang. Dari sejumlah ibu melahirkan tersebut terdapat 190 orang yang melahirkan di rumah dan hanya 1.207 yang melahirkan di fasilitas Kesehatan atau 73,15%. Dari uraian tersebut maka permasalahan rendahnya pelayanan Kesehatan ibu bersalin disebabkan 2 hal, yakni:

- a. Data proyeksi tidak sesuai dengan jumlah ibu bersalin; dan
- b. Adanya sebagian kecil masyarakat yang memilih untuk melahirkan di rumah, sementara tidak ada hukum yang dapat memaksa seseorang untuk memilih tempat persalinan. Karena memilih tempat pertolongan persalinan adalah hak pasien, dan tugas Nakes hanya pada sebatas memberikan edukasi bagi keluarga dan klien. 

3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Jumlah sasaran bayi baru lahir sebanyak 1.571 merupakan angka proyeksi. Dari proyeksi tersebut, jumlah bayi lahir secara riil tahun 2024 sebanyak 1.378 orang. Dari sejumlah bayi lahir terdapat 190 yang melahirkan di rumah. Seseorang bayi yang melahirkan di rumah dan dalam 48 jam tidak mendapatkan pelayanan Kesehatan, maka bayi dikategori tidak mendapatkan KN lengkap. Dari uraian tersebut, maka permasalahan pada pelayanan Kesehatan bayi belum mencapai target disebabkan 2 hal, yakni:

- a. Perhitungan proyeksi lebih tinggi dari jumlah bayi lahir tahun 2024; dan
- b. Masih adanya kelahiran dirumah yang mengakibatkan seseorang bayi tidak mendapatkan pelayanan pada 6-48 jam pertama.

4) Pelayanan Kesehatan Balita

Jumlah sasaran Balita tahun 2024 adalah 7.274. Dari jumlah sasaran tersebut terdapat 242 anak yang tidak secara rutin mengikuti posyandu. Akibatnya anak-anak tersebut tidak mencapai 8 kali mengikuti penimbangan di posyandu dalam satu tahun. Penyebab anak-anak Balita tidak rutin ke Posyandu umumnya karena kesibukan orang tua. Dari uraian tersebut, yang menjadi permasalahan utama adalah kurangnya perhatian orang tua Balita untuk membawa mereka ke tempat penimbangan.

5) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Jumlah usia pendidikan dasar adalah 18.228. Skrining Kesehatan oleh Puskesmas dilakukan hanya pada kelas 1, kelas 7 dan kelas 9. Dengan demikian maka terdapat sejumlah besar anak usia Pendidikan dasar yang belum mendapatkan pelayanan Kesehatan. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif.

6) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Pelayanan skrining faktor risiko pada usia produktif adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular, penyakit tidak menular, dan kesehatan calon pengantin. Dari jumlah usia produktif sebanyak 58.176 orang, sebagian besar belum melakukan pemeriksaan dini ke fasilitas Kesehatan. Dengan kata lain orang-orang yang berkunjung ke fasilitas Kesehatan adalah mereka yang mengalami keluhan atau gangguan Kesehatan. Dari uraian tersebut maka permasalahan utama adalah rendahnya kesadaran Masyarakat untuk melakukan pemeriksaan Kesehatan sebelum adanya keluhan/gejala penyakit.

7) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Jumlah sasaran penderita hipertensi sebanyak 16.665 adalah angka proyeksi, sementara jumlah penderita hipertensi secara riil lebih rendah dari angka proyeksi. Selain itu adanya penderita hipertensi yang tidak rutin setiap bulan melakukan pemeriksaan tekanan darah dan pengambilan obat hipertensi merupakan salah satu permasalahan. Dengan demikian maka permasalahan utama rendahnya pelayanan pada penderita hipertensi adalah:

- a. Jumlah estimasi penderita hipertensi terlalu tinggi, sementara jumlah penderita secara riil lebih rendah;
- b. Penderita tidak secara rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan Tekanan Darah dan pengambilan obat anti hipertensi; dan
- c. Adanya sejumlah penderita hipertensi yang memiliki alat pemeriksaan tekanan darah sehingga mereka melakukan pemeriksaan sendiri di rumah dan mengakibatkan kunjungan ke faskes menurun.

2.2.3 Urusan Pekerjaan Umum

1. Curah hujan yang rendah dan sumber air yang kurang;
2. Kesadaran masyarakat tentang sanitasi masih rendah dan belum terbangunnya IPLT;
3. Belum semua urusan dan program yang telah ditargetkan dapat dilaksanakan karena terbatas anggaran/ APBD;
4. Jumlah personil yang masih kurang; dan
5. Sarana dan prasarana yang belum memadai.

2.2.4 Urusan Perumahan Rakyat

1. Belum semua urusan dan program yang telah ditargetkan dapat dilaksanakan karena terbatas anggaran/ APBD;
2. Jumlah personil yang masih kurang; dan
3. Sarana dan prasarana yang belum memadai.

2.2.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah permasalahan internal dan permasalahan eksternal;
2. Permasalahan internal yaitu belum adanya Perda yang mengatur tentang ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Sabu Raijua; dan
3. Permasalahan eksternal adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati Perda atau peraturan-peraturan lainnya.

2.2.6 Sub Urusan Bencana

- a. Kurang ketersediaannya SDM yang memadai yang mendukung kegiatan pelayanan;
- b. Kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan terhadap korban bencana;
- c. Akses yang menjangkau lokasi bencana sangat berat sehingga menyulitkan petugas didalam melakukan pertolongan; dan
- d. Pada jenis Pelayanan Informasi Rawan Bencana tidak dilaksanakan oleh karena tidak tersedianya anggaran.

2.2.7 Urusan Sosial

- a. Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PMKS dimana SDM dan Sarana Prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal; dan
- b. Alokasi anggaran belum mampu memenuhi target Standar Pelayanan Minimal.

BAB III STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Dalam memenuhi ketentuan SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan enam bidang urusan SPM dilakukan secara efektif dengan mengingat keterbatasan anggaran dengan memperhatikan program, kegiatan dan sub kegiatan.

3.1 Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi

Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah j.o Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.1.1 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Sabu Raijua Urusan Pendidikan adalah sebagai berikut: (M)

Tabel 3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pendidikan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun 2. Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali pertahun 3. Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan 4. Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa 5. Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung 6. Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal 	<p>Peserta didik</p> <p>Kegiatan</p> <p>Peserta didik</p> <p>Peserta didik</p> <p>Peserta didik</p> <p>Peserta didik</p>
		Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dinipaling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan 2. Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan 3. Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran 4. Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 5. Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak 	<p>Kegiatan</p> <p>Kegiatan</p> <p>Kegiatan</p> <p>Kegiatan</p> <p>Kegiatan</p>
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 	<p>Pendidik dan tenaga kependidikan</p>

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			<ol style="list-style-type: none"> 2. Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan 3. Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif 5. Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah 6. Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas Sekolah /lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah 7. Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini 	<p>Pendidik dan tenaga kependidikan Guru</p> <p>Kegiatan</p> <p>Kegiatan</p> <p>Kegiatan</p> <p>Pengawas atau penilik</p> <p>Kegiatan</p>
		<p>Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan 2. Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 3. Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak 	<p>Pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>Kegiatan</p>
		<p>Pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMF/MI/MTs/Paket A/Paket B)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah 2. Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus 3. Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung 4. Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal 	<p>Peserta didik</p> <p>Peserta didik</p> <p>Peserta didik</p> <p>Peserta didik</p>

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1. Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit Komunitas
			2. Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/ SMP/MI/MTs/ Paket A/ Paket B)	1. Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2. Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			3. Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan
			4. Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/ Paket A/Paket B)	1. Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2. Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3. Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			4. Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			5. Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			<ol style="list-style-type: none"> 6. Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/ lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah 7. Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan 	Kegiatan Pengawas
		<p>Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (S^D/SMP/ Paket A/Paket B)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan 2. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 3. Fasilitas kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru Penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak 		Pendidik dan tenaga kependidikan Kegiatan
2.	Program SPM Pendidikan Kesetaraan	<p>Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (Kesetaraan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah 2. Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus 3. Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung 4. Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal <p>Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (Kesetaraan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan 2. Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 		Peserta didik Peserta didik Peserta didik Unit komunitas Kegiatan Kegiatan Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			<p>3. Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat</p> <p>4. Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran</p>	Kegiatan
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (Kesetaraan)	<p>1. Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun</p> <p>2. Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>3. Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>4. Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif</p> <p>5. Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah</p> <p>6. Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah</p> <p>7. Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan</p>	<p>Pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>Pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>Guru</p> <p>Kegiatan</p> <p>Kegiatan</p> <p>Kegiatan</p> <p>Pengawas</p>
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Kesetaraan)	<p>1. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan</p> <p>2. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>3. Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak</p>	<p>Kegiatan</p> <p>Pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>Kegiatan</p>

3.1.2 SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Sabu Raijua Urusan Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kesehatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Program Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Dokumen Dokumen

3.1.3 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

Tabel 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 2. Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM 3. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 4. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 5. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 6. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 7. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 8. Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 9. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum 10. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri 11. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat 12. Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM 13. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM 14. Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM 15. Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan 16. Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan 17. Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 18. Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 19. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 20. Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 21. Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 	<p>Dokumen</p> <p>Dokumen</p> <p>Liter/Detik</p> <p>SR</p> <p>Liter/Detik</p> <p>SR</p> <p>SR</p> <p>SR</p> <p>SR</p> <p>Penyelenggara SPAM</p> <p>Badan Usaha</p> <p>Kelompok Masyarakat</p> <p>Unit</p> <p>Unit</p> <p>Penyelenggara SPAM</p> <p>Unit</p> <p>Unit</p> <p>Rumah Tangga</p> <p>SR</p> <p>SR</p> <p>Unit</p> <p>Unit</p> <p>Dokumen</p>
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 	Dokumen

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
		Kabupaten/Kota		Dokumen
			2. Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Rumah Tangga
			3. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Rumah Tangga
			4. Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Rumah Tangga
			5. Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Perumahan	Rumah Tangga
			6. Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Rumah Tangga
			7. Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang
			8. Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok
			9. Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit
			10. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	M ³ /Hari
			11. Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Perumahan	M ³ /Hari
			12. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Perumahan	Orang
			13. Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit
			14. Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Dokumen
			15. Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Rumah Tangga
			16. Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Rumah Tangga
			17. Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Dokumen

3.1.4 SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

Tabel 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 2. Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan 3. Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 4. Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana 5. Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 6. Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 2. Penyusunan Site Plan dan/atau <i>Detail Engineering Design (DED)</i> bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 3. Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 4. Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 5. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 6. Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah Dokumen Ha Unit Rumah Unit Rumah Unit Rumah

3.1.5 SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

Tabel 3.5 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan 2. Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan	Kasus

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kasus
			3. Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen
			4. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Dokumen
			5. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang
			6. Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Dokumen
			7. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Unit
			8. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat	Dokumen
			9. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan
			2. Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan
			3. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	1. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Laporan
2.	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			2. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Orang
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			2. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Orang
			3. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			4. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Unit
			5. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Dokumen
			6. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan
			7. Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	
			8. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Orang
			9. Penyusunan Rencana Kontijensi	Dokumen
			10. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Orang
			11. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Dokumen
			12. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga
		Pelayanan	1. Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Laporan
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			3. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang
			4. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang
			5. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan
			6. Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit	Dokumen
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			2. Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			3. Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			4. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen
			5. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan
			6. Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan,	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,	1. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
			2. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2 Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	3 Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	4 3. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 4. Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 5. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 7. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 8. Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) 9. Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 10. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 1. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 2. Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 1. Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran 1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 2. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 3. Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana 1. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia 2. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	5 Laporan Dokumen Unit Orang Dokumen Laporan Laporan Dokumen Orang Desa/Kel Dokumen Laporan Dokumen

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Unit
			4. Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Laporan

3.1.6 SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

Tabel 3.6 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Sosial

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Penyediaan Perumahan 2. Penyediaan Sandang 3. Penyediaan Alat Bantu 4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 6. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 7. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 8. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 9. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 10. Pemberian Layanan Kedaruratan 11. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 12. Pemberian Layanan Rujukan	Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Dokumen Orang Orang Unit Orang Orang
2.	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1. Penyediaan Makanan 2. Penyediaan Sandang 3. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungs 4. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 5. Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang Orang Unit Orang Orang

3.1 MATRIKS RENCANA AKSI SPM

Tabel 3.7 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Sabu Raijua 2025-2029

NO	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2025					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
				Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Inisiasi			Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Inisiasi				
				Penerimaan Layanan Dasar															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kabupaten/Kota																		
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Orang	3,689	3,796								3,800	3,800						
a	Angka partisipasi sekolah	%	78.50			81.77	81.77	7,481,247,500		APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga			87.24	87.24	7,481,247,500		APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga
b	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	36.57			37.67	37.67	3,023,778,000		APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga			41.66	41.66	3,023,778,000		APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga
c	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	78.56			78.57	78.57	149,048,400		APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga			73.19	73.19	149,048,400		APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga
2	Pendidikan Dasar	Orang	18,595	18,595								16,117	16,117						
	Sekolah Dasar	Orang	12,433	12,433								10,979	10,979						
a	Angka partisipasi sekolah	%	83.71			97.85	97.85	2,865,390,000		APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga			98.40	98.40	2,865,390,000		APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga

NO	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2025					Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Inisiasi	Pencapaian SPM 2026					Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Inisiasi
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Penerima Layanan Dasar	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
b	Kemampuan literasi	Nilai	48.45			50.07	50.07	12,430,418,840	APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga			53.52	53.52	53.52	12,430,418,840	APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga	
c	Kemampuan numerasi	Nilai	45.31			50.25	50.25	75,556,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga			51.35	51.35	51.35	75,556,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga	
d	Indeks iklim keamanan	Nilai	73.46			72.79	72.79	3,439,786,678	APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga			75.49	75.49	75.49	3,439,786,678	APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga	
e	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	54.32			54.82	54.82	296,067,200	APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga			59.82	59.82	59.82	296,067,200	APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga	
f	Indeks iklim kebencanaan	Nilai	72.54			68.18	68.18	6,410,551,940	APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga			70.18	70.18	70.18	6,410,551,940	APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga	
	Sekolah Menengah Pertama	Orang	6,162	6,162	6,162							5,138	5,138						

NO	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2025					Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Inisiasi	Pencapaian SPM 2026					Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Inisiasi
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
a	Angka partisipasi sekolah	%	68.19		99.06	99.06	99.06	1,327,379,350		APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga			99.50	99.50	1,327,379,350		APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga
b	Kemampuan literasi	Nilai	41.17		50.78	50.78	50.78	270,348,000		APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga			60.48	60.48	270,348,000		APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga
c	Kemampuan numerasi	Nilai	43.78		51.39	51.39	51.39	1,832,729,013		APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga			57.93	57.93	1,832,729,013		APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga
d	Indeks iklim keamanan	Nilai	73.15		70.87	70.87	70.87	75,555,000		APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga			73.88	73.88	75,555,000		APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga
e	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	56.53		57.07	57.07	57.07	2,145,000,000		APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga			61.88	61.88	2,145,000,000		APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga
f	Indeks iklim ketahanan	Nilai	75.93		71.37	71.37	71.37	228,000,000		APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga			73.38	73.38	228,000,000		APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga

NO	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2025					Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Inisiasi	Pencapaian SPM 2026					Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan		
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
3	Pendidikan Kesetaraan	Orang	22	29	29							35	35							
a	Angka Partisipasi sekolah	%	3.25			4.15	4.15	615.302,350		APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga			6.47	6.47	615,302,350		APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga	

NO	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2027					Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Inisiasi	Pencapaian SPM 2028					Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Inisiasi
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kabupaten / Kota																		
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Orang	3,689	3,800	3,800							3,800							
a	Angka partisipasi sekolah	%	78.50			89.50	7,481,247,500			APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga			90.50	90.50	7,481,247,500		APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga
b	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	36.57			45.25	3,023,778,000			APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga			46.35	46.35	3,023,778,000		APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga
c	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	78.56			74.31	149,048,400			APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga			75.00	75.00	149,048,400		APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga
2	Pendidikan Dasar	Orang	18,595	16,117	16,117							16,117	16,117						
	Sekolah Dasar	Orang	12,433	10,979	10,979							10,979	10,979						
a	Angka partisipasi sekolah	%	83.71			99.00	2,865,390,000			APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga			100.00	100.00	2,865,390,000		APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga
b	Kemampuan literasi	Nilai	48.45			58.52	12,430,418,840			APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga			61.02	61.02	12,430,418,840		APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga

NO	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2027					Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Inisiasi	Pencapaian SPM 2028					Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Inisiasi
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
c	Kemampuan numerasi	Nilai	45.31			57.15	57.15	75,556,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga			60.05	60.05	75,556,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga		
d	Indeks iklim keamanan	Nilai	73.46			76.39	76.39	3,439,786,678	APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga			77.29	77.29	3,439,786,678	APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga		
e	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	54.32			64.82	64.82	296,067,200	APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga			67.32	67.32	296,067,200	APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga		
f	Indeks iklim kebencanaan	Nilai	72.54			72.18	72.18	6,410,551,940	APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga			73.18	73.18	6,410,551,940	APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga		
	Sekolah Menengah Pertama	Orang	6,162	5,138	5,138							5,138	5,138						
a	Angka partisipasi sekolah	%	68.19			100.00	100.00	1,327,379,350	APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga			100.00	100.00	1,327,379,350	APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga		
b	Kemampuan literasi	Nilai	41.17			62.68	62.68	270,348,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga			63.78	63.78	270,348,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga		
c	Kemampuan numerasi	Nilai	43.78			60.93	60.93	1,832,729,013	APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga			62.43	62.43	1,832,729,013	APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga		

NO	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2027					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2028					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			Inisiasi	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			Inisiasi	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
d	Indeks iklim keamarian	Nilai	73.15		76.88	76.88	76.88	75,556,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga			78.38	78.38	78.38	75,556,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga	
e	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	56.53		66.68	66.68	66.68	2,145,000,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga			67.32	67.32	67.32	2,145,000,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga	
f	Indeks iklim kebinekaan	Nilai	75.93		75.38	75.38	75.38	228,000,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga			76.38	76.38	76.38	228,000,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga	
3	Pendidikan Kesetaraan	Orang	22	35	35							35	35						
a	Angka partisipasi sekolah	%	3.25		6.58	6.58	6.58	615,302,350	APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga			6.78	6.78	6.78	615,302,350	APBD	Dinas Pendidikan dan Olahraga	

M

CM

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2029						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Inisiasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kabupaten/Kota										
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Drang	3.689	3.800	3.800						
a	Angka partisipasi sekolah	%	78.50		100.00	100.00	100.00	7,481,247,500		APBD	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahrag
b	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	36.57		50.51	50.51	50.51	3,023,778,000		APBD	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahrag
c	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	78.56		77.25	77.25	77.25	149,048,400		APBD	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahrag
2	Pendidikan Dasar	Drang	18.595	16.117							
	Sekolah Dasar	Drang	12.433	10.979							
a	Angka partisipasi sekolah	%	83.71		100.00	100.00	100.00	2,865,390,000		APBD	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahrag
b	Kemampuan literasi	Nilai	48.45		63.52	63.52	63.52	12,430,418,840		APBD	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahrag
c	Kemampuan numerasi	Nilai	45.31		62.95	62.95	62.95	75,556,000		APBD	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahrag
d	Indeks iklim keamanan	Nilai	73.46		78.19	78.19	78.19	3,439,786,678		APBD	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahrag
e	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	54.32		69.82	69.82	69.82	296,067,200		APBD	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahrag
f	Indeks iklim kebinekaan	Nilai	72.54		74.18	74.18	74.18	6,410,551,940		APBD	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahrag
	Sekolah Menengah Pertama	Drang	6.162	5.138							
a	Angka partisipasi sekolah	%	68.19		100.00	100.00	100.00	1,327,379,350		APBD	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahrag
b	Kemampuan literasi	Nilai	41.17		64.88	64.88	64.88	270,348,000		APBD	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahrag
c	Kemampuan numerasi	Nilai	43.78		63.93	63.93	63.93	1,832,729,013		APBD	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahrag
d	Indeks iklim keamanan	Nilai	73.15		79.88	79.88	79.88	75,556,000		APBD	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahrag
e	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	56.53		71.48	71.48	71.48	2,145,000,000		APBD	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahrag
f	Indeks iklim kebinekaan	Nilai	75.93		77.38	77.38	77.38	228,000,000		APBD	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahrag
3	Pendidikan Kesetaraan	Orang	22	35							
a	Angka partisipasi sekolah	%	3.25		6.88	6.88	6.88	615,302,350		APBD	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahrag

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2025					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Inisiasi	Pencapaian SPM 2026					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL		1,650	1,650	1,650		1,216,670,950			APBD	DINKES PP DAN KB	1,668	1,668			2,187,419,491		APBD	DINKES PP DAN KB	
1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul		1650	1,650	1,650	1,650							1,668	1,668					
2	Tablet tambah darah	Tablet		311040	311,040	311,040	311,040							300,240	300,240					
3	Tes kehamilan	Paket		1650	1,650	1,650	1,650							1,668	1,668					
4	Pemeriksaan Hb	Paket		1650	1,650	1,650	1,650							1,668	1,668					
5	Pemeriksaan golongan darah	Paket		1650	1,650	1,650	1,650							1,668	1,668					
6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket		284	248	248	248							250	250					
7	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket		1650	1,650	1,650	1,650							1,668	1,668					
8	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket		1650	1,650	1,650	1,650							1,668	1,668					
9	Buku KIA	Buku		1650	1,650	1,650	1,650							1,668	1,668					
10	Media KIE	Paket		12	12	12	12							1,668	1,668					

M

ad

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2025					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran					
				Pencapaian SPM 2026					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran					
6	Buku Kesehatan Ibu Anak (KIA)	Buku	1571		1.447	1.447							
7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	12		107	107							
8	Dokter/Dokter spesialis anak	Orang	12		18	18							
9	Bidan	Orang	96		199	199							
10	Perawat	Orang	96		214	214							
11	Tenaga kefarmasian	Orang	6		30	30							
12	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	6		7	7							
13	Tenaga gizi	Orang	6		34	34							
14	Kader Kesehatan	Orang	255		1.255	1.255							
4	PELAYANAN KESEHATAN BALITA		7.274	6.380				273.980,00		431.894,859		APBD	DINKES PP DAN KB
1	Kuisiner Pra Skrining Perkembangan (KPSF) atau instrumen standar lain yang berlaku	Formulir	7274			6.380				7.018	7.018		
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	7274			6.380				7.018	7.018		

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
				Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
3	Buku KIA	Buku	7274		6,380	6,380					
4	Vitamin A biru	Kapsul	15316		654	654					
5	Vitamin A merah	Kapsul	15316		6,464	6,464					
6	Vaksin Imunisasi dasar										
	a. BCG	Vaksin	7274		6,380	6,380					
	b. Polio tetes	Vaksin	30272		25,520	25,520					
	c. IPV (Polio suntik)	Vaksin	7274		12,760	12,760					
	d. DPT-HB-Hib	Vaksin	7274		19,140	19,140					
	e. Campak Rubela	Vaksin	7274		6,380	6,380					
7	Vaksin imunisasi Lanjutan: anak Bawah Dua Tahun (Baduta)										
	a. DPT-HB-Hib	Vaksin	7274		6,380	6,380					
	b. Campak Rubela	Vaksin	7274		6,380	6,380					

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran							
				Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran							
8	Jarum suntik dan BHP	Unit	7274		6,380	6	6		7,018	7,018					
9	Peralatan anafilaktik	Paket	6		6	6	6		6	6					
10	Formula terapi gizi buruk	Paket	7274		75	75	75		75	75					
11	Dokter	Orang	12		18	18	18		18	18					
12	Bidan	Orang	85		199	199	199		199	199					
13	Perawat	Orang	85		214	214	214		214	214					
14	Tenaga gizi	Orang	6		34	34	34		34	34					
15	Guru PAUD	Orang	475		475	475	475		475	475					
16	Kader kesehatan	Orang	255		1,255	1,255	1,255		1,255	1,255					
5	PELAYANAN KESEHATAN USIA PENDIDIKAN DASAR		18,228	16,183				3,980,000				126,121,088	APBD	DINKES PP DAN KB	
1	Form pencatatan/ buku rapor kesehatanku	Form/Buku	18228		16,183	16,183	16,183		18,083	18,083					
2	Form Pencatatan/ buku pemantauan kesehatan	Form/Buku	18228		16,183	16,183	16,183		18,083	18,083					
3	Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen	18228		16,183	16,183	16,183		18,083	18,083					

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Peleaksana	
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				
				Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Peleaksana	
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				
	Alat : KIT IVA Tes	Unit	6		6	6						
3	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	5817 6		55,249	55,249		55,249		57,607	57,607	
4	Kit Ophthalmologi komunitas	Unit	6		6	6				6	6	
5	Kuesicner PUMA	Dokumen	5817 6		5,172	5,172				5,172	5,172	
6	Alat pelayanan KB		18		18	18				18	18	
	a. Set pemasangan dan pencabutan AKDR	Unit	6		6	6				6	6	
	b. Set pemasangan dan pencabutan implan	Unit	6		6	6				6	6	
	c. Vasektomi set	Unit	6		6	6				6	6	
7	Formulir pencatatan dan pelaporan/riwayat keahliannya (ASIK), E Kohort Kesehatan Usia Produktif	Dokumen	5817 6		55,249	55,249		55,249		57,607	57,607	
8	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	5817 6		27,138	27,138		27,138		27,138	27,138	
9	Dokter/dokter gigi	Orang	12		18	18				18	18	
10	Bidan	Orang	97		199	199				199	199	

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
				Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
11	Perawat	Orang	97		214	214	214				
12	Tenaga gizi	Orang	12		34	34	34				
13	Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	12		7	7	7				
14	Dokter terlatih IVA	Orang	0		0	0	-				
15	Bidan terlatih IVA	Orang	0		0	0	-				
16	Kader kesehatan	Orang	150		126	126	126				
7	PELAYANAN KESEHATAN USIA LANJUT		9,639	9,486				12,040,000		APBD DAN APBN	DINKES PP DAN KB
1	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	69		58	58	58				
2	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	69		58	58	58				
3	Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	69		58	58	58				
4	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	1309 2		9,486	9,486	9,916				

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
5	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), Instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthele)	Paket	1309 2		9,486	9,486	9,486				
6	Buku Kesehatan Lansia atau aplikasi pencatatan terkait lansia (ASIK, ekohort)	Buku	1309 2		9,486	9,486	9,916				
7	Media KIE	Paket	12		6	6	6				
8	Dokter	Orang	12		18	18	18				
9	Bidan	Orang	85		199	199	199				
10	Perawat	Orang	72		214	214	214				
11	Tenaga gizi	Orang	12		34	34	34				
12	Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	12		7	7	7				
13	Kader kesehatan	Orang	150		20	20	20				
8	PELAYANAN KESEHATAN PENDEKTA HIPERTENSI		16,66 5	2,011				6,730,000	APBD	DINKES PP DAN KB	
1	Pedoman pengendalian hipertensi dan media KIE	Paket	1666 5		69	69	69		APBD	DINKES PP DAN KB	

M

cm

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
				Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
2	Obat Hipertensi	Paket	1666 5	6	6	69	69	6			
3	Tensimeter	Unit	69	69	69	69	69	69			
4	Formulir pencatatan dan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Dokumen	1	2,011	2,011	2,011	2,011	2,020			
5	Media Promosi Kesehatan	Paket	12	69	69	69	69	69			
6	Dokter/dokter gigi	Orang	12	18	18	18	18	18			
7	Bidan	Orang	98	199	199	199	199	199			
8	Perawat	Orang	86	214	214	214	214	214			
9	Tenaga gizi	Orang	12	34	34	34	34	34			
10	Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	6	6	6	6	6	6			
11	Tenaga kefarmasian	Orang	6	30	30	30	30	30			
12	Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	6	6	6	6	6	6			
9	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS		203	228				111,395,000		APBD DAN APBN	DINKES PP DAN KB
1	Obat Diabetes Melitus	Paket	301	6	6	6	6	6		APBD DAN APBN	DINKES PP DAN KB

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2025					Instansi Pelaksanaan	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
2	Alat pemantau kadar gula dalam darah (fotometer atau glukometer)	Unit	69		6	6					
3	BMHP gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah: reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	301		228	228			228	228	
4	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi SI PTM, ASIK, Simplus	Formulir	301		228	228			228	228	
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Pedoman	12		18	18			18	18	
6	Dokter/dokter gigi	Orang	12		18	18			18	18	
7	Bidan	Orang	98		199	199			199	199	
8	Perawat	Orang	98		214	214			214	214	
9	Tenaga kefarmasian	Orang	12		30	30			30	30	
10	Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	12		6	6			6	6	
11	Tenaga gizi	Orang	12		34	34			34	34	
12	Teknis medis (ATLM)	Orang	12		30	30			30	30	

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
10	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT (ODGJ)		78	76				20.430,00 ₀		APBD	DINKES PP DAN KB	76			32.902,7 ₁₉		APBD	DINKES PP DAN KB	
1	Buku Pedoman Pengolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Pengolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	12	6	6							6	6						
2	Penyediaan psikofarmaka	Paket	6	6	6							6	6						
3	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau melalui aplikasi	Formulir	97	76	76							76	76						
4	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	Formulir	97	76	76							76	76						
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	12	6	6							6	6						
6	Tenaga medis: Dokter	Orang	6	6	18							18	18						
7	Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	6	6	15							15	15						

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
				Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
9	Dokter/Sp.PD/Sp.P	Orang	12		18	214	18	214	18		
10	Perawat	Orang	12		214	214	214	214	214		
11	Tenaga kefarmasian	Orang	6		30	30	30	30	30		
12	Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	6		6	6	6	6	6		
13	Tenaga ATLM	Orang	6		30	30	30	30	30		
14	Radiografer	Orang	2		2	2	1	1	1		
15	Kader kesehatan	Orang	133		126	126	126	126	126		
12	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV		1,828	1,541						201,525,000	DINKES PP DAN KB
1	Media KIE (lembar balik, leaflet, poster, banner)	Paket	69		7	7	7	7	7		
2	Tes Cepat HIV (RDT) pertama	Tes	1828		1,541	1,541	1,902	1,902	1,902		
3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	1828		1,541	1,541	1,902	1,902	1,902		

M

CM

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2025					Instansi Pelaksanaan	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
4	Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	1828		1,541	1,541	1,541				
5	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	12		18	18	18				
6	Perawat	Orang	6		199	199	199				
7	Bidan	Orang	6		214	214	214				
8	Abli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	6		30	30	30				
9	Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	6		7	7	7				
10	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	5		7	7	6				

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								2,187,419,491								2,187,419,491			
1	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL		1.650	1.668	1.668			146,190,385		APBD	DINKES PP DAN KB	1.668	1.668			146,190,385		APBD	DINKES PP DAN KB
1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	1650		1.668	1.668	1,668							1.668	1.668				
2	Tablet tambah darah	Tablet	311040			300,240	300,240							300,240	300,240				
3	Tes kehamilan	Paket	1650			1.668	1.668							1.668	1.668				
4	Pemeriksaan Hb	Paket	1650			1.668	1.668							1.668	1.668				
5	Pemeriksaan golongan darah	Paket	1650			1.668	1.668							1.668	1.668				
6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket	284			250	250							250	250				
7	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining dengan eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	1650			1.668	1.668							1.668	1.668				
8	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	1650			1.668	1.668							1.668	1.668				
9	Buku KIA	Buku	1650			1.668	1.668							1.668	1.668				
10	Media KIE	Paket	12			1.668	1.668							1.668	1.668				

M

CM

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2027					Pencapaian SPM 2028					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Penerimaan Layanan Dasar		
11	Gel USG, untuk Puskesmas yang memiliki alat USG	Botol	110		250	250						250	250		
12	Dokter/Dokter spesialis obgyn	Orang	12		42	42						42	42		
13	Bidan	Orang	62		94	94						94	94		
14	Perawat	Orang	124		107	107						107	107		
15	Tenaga kefarmasian	Orang	6		30	30						30	30		
16	Tenaga gizi	Orang	6		34	34						34	34		
17	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (setiap kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	1650		1,668	1,668						1,668	1,668		
2	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN		1,650	1,592	1,592	1,592	248,706,667	1,592	1,592	1,592	248,706,667	1,592	1,592	APBD	DINKES PP DAN KB
1	Formulir partograf	Formulir	1650		1,592	1,592						1,592	1,592		
2	Kartu ibu (rekam medis)	Paket	1650		1,592	1,592						1,592	1,592		
3	Buku KIA	Buku	1650		1,592	1,592						1,592	1,592		
4	Media KIE	Paket	12		12	12						12	12		
5	Dokter/Dokter spesialis obgyn	Orang	12		107	107						107	107		
6	Bidan	Orang	96		107	107						107	107		
7	Perawat	Orang	96		107	107						107	107		

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
8	Tenaga kefarmasian	Orang	6		30	30					
9	Tenaga gizi	Orang	6		34	34					
3	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR		1.571	1.516	1.516		109,441,475		109,441,475	DINKES PP DAN KB	
1	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	1571		1,516	1,516			1,516		
2	Vitamin K1 injeksi	Ampul	1571		1,516	1,516			1,516		
3	Salap/tetes mata antibiotik	Orang	1571		1,516	1,516			1,516		
4	Formulir bayi baru lahir	Formulir	1571		1,516	1,516			1,516		
5	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Formulir	1571		4,548	4,548			4,548		
6	Buku Kesehatan Ibu Anak (KIA)	Buku	1571		1,668	1,668			1,668		
7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	12		2	2			2		
8	Dokter/Dokter spesialis anak	Orang	12		18	18			18		
9	Bidan	Orang	96		199	199			199		
10	Perawat	Orang	96		214	214			214		
11	Tenaga kefarmasian	Orang	6		30	30			30		
12	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	6		12	12			12		
13	Tenaga gizi	Orang	6		34	34			34		

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
14	Kader Kesehatan	Orang	255	7,018	1,255	1,255	7,018	431,894,859	APBD	DINKES PP DAN KB	
4	PELAYANAN KESEHATAN BALITA		7,274	7,018	1,255	1,255	7,018	431,894,859	APBD	DINKES PP DAN KB	
1	Kuisiner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Formulir	7274	7,018	7,018	7,018	7,018				
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	7274	7,018	7,018	7,018	7,018				
3	Buku KIA	Buku	7274	7,018	7,018	7,018	7,018				
4	Vitamin A biru	Kapsul	15316	853	853	853	853				
5	Vitamin A merah	Kapsul	15316	7,266	7,266	7,266	7,266				
6	Vaksin Imunisasi dasar										
	a. BCG	Vaksin	7274	7,018	7,018	7,018	7,018				
	b. Polio tetes	Vaksin	30272	28,072	28,072	28,072	28,072				
	c. IPV (Polio suntik)	Vaksin	7274	14,036	14,036	14,036	14,036				
	d. DPT-HB-Hib	Vaksin	7274	21,054	21,054	21,054	21,054				
	e. Campak Rubela	Vaksin	7274								
7	Vaksin imunisasi Lanjutan: anak Bawah Dua Tahun			7,018	7,018	7,018	7,018				

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
	(Baduta)										
	a. DPT-HB-Hib	Vaksin	7274		7,018	7,018	7,018		7,018		
	b. Campak Rubela	Vaksin	7274		7,018	7,018	7,018		7,018		
8	Jarum suntik dan EHP	Unit	7274		7,018	7,018	7,018		7,018		
9	Peralatan anaflaktik	Paket	6		6	6	6		6		
10	Formula terapi gizi buruk	Paket	7274		75	75	75		75		
11	Dokter	Orang	12		18	18	18		18		
12	Bidan	Orang	85		199	199	199		199		
13	Perawat	Orang	85		214	214	214		214		
14	Tenaga gizi	Orang	6		34	34	34		34		
15	Guru PAUD	Orang	475		475	475	475		475		
16	Kader kesehatan	Orang	255		1,255	1,255	1,255		1,255		
5	PELAYANAN KESEHATAN USIA PENDIDIKAN DASAR		18,228	18,083	18,083		126,121,088		18,083	18,083	
1	Form pencatatan/ buku rapor kesehatan/ kesehatan	Form/Buku	18228		18,083	18,083	18,083		18,083		
2	Form Pencatatan/ buku pemantauan kesehatan	Form/Buku	18228		18,083	18,083	18,083		18,083		
3	Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen	18228		18,083	18,083	18,083		18,083		

M

CM

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Formulir	18228		101	101					
5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	18228		10	10					
6	Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun di luar sekolah	Tablet	18228		18,03	18,083					
7	Alat pemeriksaan Hb	Alat	18228		18,03	18,083					
8	strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	Strip	1739		903	903					
9	Media promosi kesehatan	Paket	12		12	12					
10	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Vaksin	18228		6,695	6,695					
11	Dokter/dokter gigi	Orang	12		18	18					
12	Bidan	Orang	97		199	199					
13	Perawat	Orang	85		214	214					
14	Tenaga gizi	Orang	12		34	34					
15	Tenaga kefarmasian	Orang	6		30	30					

M

CM

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2027				Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2028				Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi				Anggaran	Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan			
16	Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	12		7	417						7					
17	Guru	Orang	417		417	417						417					
18	Kader Kesehatan	Orang	186		186	186						186					
6	PELAYANAN KESEHATAN USIA PRODUKTIF		58,176	57,607	57,607		164,272,020	APBD	DINKES PP DAN KB			57,607		164,272,020	APBD	DINKES PP DAN KB	
1	Pedoman dan media KIE	Paket	92		69							69					
2	Alat dalam melakukan pemeriksaan alat ukur skrining bedah, Alat berat tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LLA)	Paket	69		69							69					
	Alat : Tensimeter	Unit	69		69							69					
	Alat : Glukometer	Unit	69		69							69					
	Alat : Alat pemeriksa Hb	Unit	69		69							69					
	Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Paket	58176	57,607	57,607							57,607		57,607			
	Alat : KIT IVA Tes	Unit	6		6							6					
3	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	58176	57,607	57,607							57,607		57,607			
4	Kit Ophthalmologi komunitas	Unit	6		6							6					
5	Kuesioner PUMA	Dokumen	58176	5,172	5,172							5,172		5,172			
6	Alat pelayanan KB		18		18							18		18			

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
	a. Set pemasangan dan pencabutan AKDR	Unit	6		6	6					
	b. Set pemasangan dan pencabutan implan	Unit	6		6	6					
	c. Vasektomi set	Unit	6		6	6					
	Formulir pencatatan dan pelaporan/matrik laporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK), E Kohort Kesehatan Usia Produktif	Dokumen	5817 6		57,60 7	57,60 07					
7	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	5817 6		27,13 8	27,13 38					
9	Dokter/dokter gigi	Orang	12		18	18					
10	Bidan	Orang	97		199	199					
11	Persawat	Orang	97		214	214					
12	Tenaga gizi	Orang	12		34	34					
13	Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	12		7	7					
14	Dokter terlatih IVA	Orang	0		-	-					
15	Bidan terlatih IVA	Orang	0		-	-					
16	Kader kesehatan	Orang	150		126	126					
7	PELAYANAN KESEHATAN USIA LANJUT		9,639	9,916 6	9,91	9,916	9,916	9,916	95,166,500	APBD DAN APBN	
1	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur	Paket	69		58	58				APBD DAN APBN	

M

M

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
	lingkar perut, lingkaran atas, dan tensimeter										
2	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	69	58	58	58	58	58			
3	Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	69	58	58	58	58	58			
4	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	1309 2	9,916	9,916	9,916	9,916	9,916			
5	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	1309 2	9,916	9,916	9,916	9,916	9,916			
6	Buku Kesehatan Lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya (ASIK, ekohort)	Buku	1309 2	9,916	9,916	9,916	9,916	9,916			
7	Media KIE	Paket	12	6	6	6	6	6			
8	Dokter	Orang	12	18	18	18	18	18			
9	Bidan	Orang	85	199	199	199	199	199			
10	Perawat	Orang	72	214	214	214	214	214			
11	Tenaga gizi	Orang	12	34	34	34	34	34			
12	Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	12	7	7	7	7	7			
13	Kader kesehatan	Orang	150	20	20	20	20	20			
8	PELAYANAN KESEHATAN PENDEBITA		16,66 5	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	10,838,732	APBD	
									10,838,732	DINKES PP DAN KB	
									2,020	APBD	
									2,020	DINKES PP DAN KB	
									10,838,732	DINKES PP DAN KB	

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
	HIPERTENSI										
1	Pedoman pendanaan hipertensi dan media KIE	Paket	16665		69	69					
2	Obat Hipertensi	Paket	16665		6	6					
3	Tensimeter	Unit	69		69	69					
4	Formulir pencatatan dan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Dokumen	1		2,020	2,020					
5	Media Promosi Kesehatan	Paket	12		69	69					
6	Dokter/dokter gigi	Orang	12		18	18					
7	Bidan	Orang	98		199	199					
8	Perawat	Orang	86		214	214					
9	Tenaga gizi	Orang	12		34	34					
10	Tenaga promosi kesehatan dan ijmumu perilaku	Orang	6		6	6					
11	Tenaga kefarmasian	Orang	6		30	30					
12	Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	6		6	6					
9	PELAYANAN KESEHATAN PENDEKITA DIABETES MELITUS		203	228			179,402,761	228	228	179,402,761	
1	Obat Diabetes Mellitus	Paket	301		6	6				APBD DAN APBN	
2	Alat pemantau kadar gula dalam darah (fotometer atau glukometer)	Unit	69		6	6				DINKES PP DAN KB	

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
3	BMHP gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah: reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	301		228	228	228				
4	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi SI PTM, ASIK, Simpus	Formulir	301		228	228	228				
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Pedoman	12		18	18	18				
6	Dokter/dokter gigi	Orang	12		18	18	18				
7	Bidan	Orang	98		199	199	199				
8	Perawat	Orang	98		214	214	214				
9	Tenaga kefarmasian	Orang	12		30	30	30				
10	Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	12		6	6	6				
11	Tenaga gizi	Orang	12		34	34	34				
12	Teknis medis (ATLM)	Orang	12		30	30	30				
10	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT (ODGJ)		78	76			76	76	32,902,719	DINKES PP DAN KB	
1	Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa terbaru (bila	Buku	12		6	6	6			APBD	

M

M

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2027				Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2028				Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi				Anggaran	Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan			
	sudah tersedia)																
2	Penyediaan psikofarmaka	Paket	6		6	6						6	6				
3	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau melalui aplikasi	Formulir	97		76	76						76	76				
4	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	Formulir	97		76	76						76	76				
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	12		6	6						6	6				
6	Tenaga medis: Dokter	Orang	6		18	18						18	18				
7	Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (nptb: Psikofarmaka klinis, perawatan jiwa, perawatan terlatih)	Orang	6		15	15						15	15				
8	Tenaga profesional lainnya	Orang	6		1	1						1	1				
9	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang	6		6	6						6	6				
11	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS		1,185	1,022								1,022	1,022	317,924,257	APBD DAN APBN	DINKES PP DAN KB	
1	Media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner)	Paket	12		7	7						7	7				

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana					
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran								
				Pencapaian SPM 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana					
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran								
2	Reagen Ziehl Neelsen (ZN) TB	Kit	12		7	7			7	7						
3	Masker bedah dan masker N95	Paket	1411		1,022	1,022			1,022	1,022						
4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spiritus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak penering	Paket	2822		7	7			7	7						
5	Kartrid tes cepat molekuler	Tes	2822		1,022	1,022			1,022	1,022						
6	Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	1411		7	7			7	7						
7	Pedoman/standar operasional prosedur	Dokumen	69		7	7			7	7						
8	Tuberkulin	Vial	1024		34	34			34	34						
9	Dokter/Sp.PD/Sp.F	Orang	12		18	18			18	18						
10	Perawat	Orang	12		214	214			214	214						
11	Tenaga kefarmasian	Orang	6		30	30			30	30						
12	Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	6		6	6			6	6						
13	Tenaga ATLM	Orang	6		30	30			30	30						
14	Radiografer	Orang	2		1	1			1	1						
15	Kader kesehatan	Orang	133		126	126			126	126						
12	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV		1.828	1.902					1.902	1.902			324,558,028		APBD	DINKES PP DAN KB

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	Media KIE (lembar balik, leaflet, poster, banner)	Paket	69		7	7					
2	Tes Cepat HIV (RDT) pertama	Tes	1828		1,902	1,902					
3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/ Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	1828		1,902	1,902					
4	Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	1828		1,902	1,902					
5	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	12		18	18					
6	Perawat	Orang	6		7	7					
7	Bidan	Orang	6		7	7					
8	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	6		7	7					
9	Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	6		7	7					
10	Tenaga non kesehatan Terlatih/ Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	5		6	6					

NO	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2029						Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL		1,650	1,668	1,668			2,187,419,491		APBD	DINKES PP DAN KB	
1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	1650			1,668						
2	Tablet tambah darah	Tablet	311040			300,240						
3	Tes kehamilan	Paket	1650			1,668						
4	Pemeriksaan Hb	Paket	1650			1,668						
5	Pemeriksaan golongan darah	Paket	1650			1,668						
6	Alat deteksi resiko ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket	284			250	250					
7	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	1650			1,668	1,668					
8	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	1650			1,668	1,668					
9	Buku KIA	Buku	1650			1,668	1,668					
10	Media KIE	Paket	12			1,668	1,668					
11	Gel USG, untuk Puskesmas yang memiliki alat USG	Botol	110			250	250					
12	Dokter/Dokter spesialis obgyn	Orang	12			42	42					
13	Bidan	Orang	62			94	94					
14	Perawat	Orang	124			107	107					
15	Tenaga kefarmasian	Orang	6			30	30					
16	Tenaga gizi	Orang	6			34	34					

NO	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2029					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
17	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	1650		1,668	1,668	1,668				
2	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN		1,650	1,592			248,706,667		APBD	DINKES PP DAN KB	
1	Formulir partograf	Formulir	1650		1,592	1,592					
2	Kartu ibu (rekam medis)	Paket	1650		1,592	1,592					
3	Buku KIA	Buku	1650		1,592	1,592					
4	Media KIE	Paket	12		12	12					
5	Dokter/Dokter spesialis obgyn	Orang	12		107	107					
6	Bidan	Orang	96		107	107					
7	Perawat	Orang	96		107	107					
8	Tenaga kefarmasian	Orang	6		30	30					
9	Tenaga gizi	Orang	6		34	34					
3	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR		1,571	1,516			109,441,475		APBD	DINKES PP DAN KB	
1	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	1571		1,516	1,516					
2	Vitamin K1 injeksi	Ampul	1571		1,516	1,516					
3	Salep/tetes mata antibiotic	Orang	1571		1,516	1,516					
4	Formulir bayi baru lahir	Formulir	1571		1,516	1,516					
5	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Formulir	1571		4,548	4,548					

NO	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2029						Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layartan	Realisasi	Anggaran				
6	Buku Kesehatan Ibu Anak (KIA)	Buku	1571			1,668	1,668					
7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	12			2	2					
8	Dokter/Dokter spesialis anak	Orang	12			18	18					
9	Bidan	Orang	96			199	199					
10	Perawat	Orang	96			214	214					
11	Tenaga kefarmasian	Orang	6			30	30					
12	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	6			12	12					
13	Tenaga gizi	Orang	6			34	34					
14	Kader Kesehatan	Orang	255			1,255	1,255					
4	PELAYANAN KESEHATAN BALITA		7,274	7,018				431,894,859	APBD	DINKES PP DAN KB		
1	Kuisiomer Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen standar lain yang berlaku	Formulir	7274			7,018	7,018					
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	7274			7,018	7,018					
3	Buku KIA	Buku	7274			7,018	7,018					
4	Vitamin A biru	Kapsul	15316			853	853					
5	Vitamin A merah	Kapsul	15316			7,266	7,266					

NO	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2029						Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				
6	Vaksin Imunisasi dasar											
	a. BCG	Vaksin	7274			7,018	7,018		7,018			
	b. Polio tetes	Vaksin	30272			28,072	28,072		28,072			
	c. IPV (Polio suntik)	Vaksin	7274			14,036	14,036		14,036			
	d. DPT-HB-Hib	Vaksin	7274			21,054	21,054		21,054			
	e. Campak Rubela	Vaksin	7274									
7	Vaksin imunisasi Lanjutan: anak Bawah Dua Tahun (Baduta)											
	a. DPT-HB-Hib	Vaksin	7274			7,018	7,018		7,018			
	b. Campak Rubela	Vaksin	7274			7,018	7,018		7,018			
8	Jarum suntik dan BHP	Unit	7274			7,018	7,018		7,018			
9	Peralatan anafilaktik	Paket	6			6	6		6			
10	Formula terapi gizi buruk	Paket	7274			75	75		75			
11	Dokter	Orang	12			18	18		18			
12	Bidan	Orang	85			199	199		199			
13	Perawat	Orang	85			214	214		214			
14	Tenaga gizi	Orang	6			34	34		34			

NO	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2029						Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				
15	Guru PAUD	Orang	475			475	475					
16	Kader kesehatan	Orang	255			1,255	1,255					
5	PELAYANAN KESEHATAN USIA PENDIDIKAN DASAR		18,228	18,083			18,083	126,121,088		APBD	DINKES PP DAN KB	
1	Form pencatatan/ buku rapor kesehatanku	Form/Buku	18228			18,083	18,083					
2	Form Pencatatan/ buku pemantauan kesehatan	Form/Buku	18228			18,083	18,083					
3	Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen	18228			18,083	18,083					
4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Formulir	18228			101	101					
5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	18228			10	10					
6	Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun di luar sekolah	Tablet	18228			18,083	18,083					
7	Alat pemeriksaan Hb	Alat	18228			18,083	18,083					
8	strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	Strip	1739			903	903					
9	Media promosi kesehatan	Paket	12			12	12					

NO	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2029						Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				
10	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Vaksin	18228		6,695	6,695						
11	Dokter/dokter gigi	Orang	12		18	18						
12	Bidan	Orang	97		199	199						
13	Perawat	Orang	85		214	214						
14	Tenaga gizi	Orang	12		34	34						
15	Tenaga kefarmasian	Orang	6		30	30						
16	Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	12		7	7						
17	Guru	Orang	417		417	417						
18	Kader Kesehatan	Orang	186		186	186						
6	PELAYANAN KESEHATAN USIA PRODUKTIF		58,176	57,607	57,607		164,272,020		APBD	DINKES PP DAN KB		
1	Pedoman dan media KIE	Paket	92		69	69						
2	Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LLA)	Paket	69		69	69						
	Alat : Tensimeter	Unit	69		69	69						
	Alat : Glukometer	Unit	69		69	69						
	Alat : Alat pemeriksa Hb	Unit	69		69	69						
	Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Paket	58176		57,607	57,607						
	Alat : KIT IVA Tes	Unit	6		6	6						

NO	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2029						Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				
3	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	58176			57,607	57,607					
4	Kit Ophthalmologi komunitas	Unit	6			6	6					
5	Kuesioner PUMA	Dokumen	58176			5,172	5,172					
6	Alat pelayanan KB		18			18	18					
	a. Set pemasangan dan pencabutan AKDR	Unit	6			6	6					
	b. Set pemasangan dan pencabutan implan	Unit	6			6	6					
	c. Vasektomi set	Unit	6			6	6					
7	Formulir pencatatan dan pelaporan/matrik laporan Aplikasi Sehat Indonesia (ASIK), E Kohort Kesehatan Usia Produktif	Dokumen	58176			57,607	57,607					
8	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	58176			27,138	27,138					
9	Dokter/dokter gigi	Orang	12			18	18					
10	Bidan	Orang	97			199	199					
11	Perawat	Orang	97			214	214					
12	Tenaga gizi	Orang	12			34	34					
13	Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	12			7	7					
14	Dokter terlatih IVA	Orang	0			-	-					
15	Bidan terlatih IVA	Orang	0			-	-					
16	Kader kesehatan	Orang	150			126	126					
7	PELAYANAN KESEHATAN USIA LANJUT		9,639	9,916	9,916		9,916	95,166,500		APBD DAN APEN	DINKES PP DAN KB	

NO	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2029						Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				
1	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	69			58	58					
2	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	69			58	58					
3	Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	69			58	58					
4	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolestrol, lancet, kapas alkohol	Paket	13092			9,916	9,916					
5	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	13092			9,916	9,916					
6	Buku Kesehatan Lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya (ASIK, ekohort)	Buku	13092			9,916	9,916					
7	Media KIF	Paket	12			6	6					
8	Dokter	Orang	12			18	18					
9	Bidan	Orang	85			199	199					
10	Perawat	Orang	72			214	214					
11	Tenaga gizi	Orang	12			34	34					
12	Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	12			7	7					
13	Kader kesehatan	Orang	150			20	20					
8	PELAYANAN KESEHATAN PENDEKITA HIPERTENSI		16,665	2,020	2,020	2,020		10,838,732		APBD	DINKES PP DAN KB	

NO	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2029						Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				
1	Pedoman pengendalian hipertensi dan media KIE	Paket	16665			69	69					
2	Obat Hipertensi	Paket	16665			6	6					
3	Tensimeter	Unit	69			69	69					
4	Formulir pencatatan dan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Dokumen	1			2,020	2,020					
5	Media Promosi Kesehatan	Paket	12			69	69					
6	Dokter/dokter gigi	Orang	12			18	18					
7	Bidan	Orang	98			199	199					
8	Perawat	Orang	86			214	214					
9	Tenaga gizi	Orang	12			34	34					
10	Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	6			6	6					
11	Tenaga kefarmasian	Orang	6			30	30					
12	Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	6			6	6					
9	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS		203	228	228			179,402,761		APBD DAN APBN	DINKES PP DAN KB	
1	Obat Diabetes Melitus	Paket	301			6	6					
2	Alat pemantau kadar gula dalam darah (fotometer atau glukometer)	Unit	69			6	6					
3	BMHP gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah: reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	301			228	228					

NO	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2029						Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				
4	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi SI PTM, ASIK, Simpus	Formulir	301			228	228					
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Pedoman	12			18	18					
6	Dokter/dokter gigi	Orang	12			18	18					
7	Bidan	Drang	98			199	199					
8	Perawat	Orang	98			214	214					
9	Tenaga kefarmasian	Orang	12			30	30					
10	Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	12			6	6					
11	Tenaga gizi	Drang	12			34	34					
12	Teknis medis (ATLM)	Orang	12			30	30					
10	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT (ODGJ)		78	76				32,902,719		APBD	DINKES PP DAN KB	
1	Buku Pedoman Pengolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPLGJ III) atau Buku Pedoman Pengolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	12			6	6					
2	Penyediaan psikofarmaka	Paket	6			6	6					
3	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau melalui aplikasi	Formulir	97			76	76					
4	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	Formulir	97			76	76					
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	12			6	6					

NO	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2029					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
6	Tenaga medis: Dokter	Orang	6			18	18				
7	Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	6			15	15				
8	Tenaga profesional lainnya	Orang	6			1	1				
9	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang	6			6	6				
11	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS		1,185	1,022				317,924,257	APBD DAN APBN	DINKES PP DAN KB	
1	Media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner)	Paket	12			7	7				
2	Reagen Ziehl Neelsen (ZN) TB	Kit	12			7	7				
3	Masker bedah dan masker N95	Paket	1411			1,022	1,022				
4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spiritus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	2822			7	7				
5	Kartrid tes cepat molekuler	Tes	2822			1,022	1,022				
6	Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	1411			7	7				
7	Pedoman/standar operasional prosedur	Dokumen	69			7	7				
8	Tuberkulin	Vial	1024			34	34				
9	Dokter/Sp.PD/Sp.P	Orang	12			18	18				
10	Perawat	Orang	12			214	214				
11	Tenaga kefarmasian	Orang	6			30	30				
12	Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	6			6	6				

NO	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2029						Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				
13	Tenaga ATLM	Orang	6			30	30					
14	Radiografer	Orang	2			1	1					
15	Kader kesehatan	Orang	133			126	126					
12	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV		1,828	1,902				324,558,028		APBD	DINKES PP DAN KB	
1	Media KIE (lembar balik, leaflet, poster, banner)	Paket	69			7	7					
2	Tes Cepat HIV (RDT) pertama	Tes	1828			1,902	1,902					
3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	1828			1,902	1,902					
4	Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	1828			1,902	1,902					
5	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	12			18	18					
6	Perawat	Orang	6			7	7					
7	Bidan	Orang	6			7	7					
8	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	6			7	7					
9	Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	6			7	7					
10	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	5			6	6					

Tabel 3.9 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Sabu Raijua 2025-2029

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	Kabupaten/Kota	Orang	2,475	2,720	2,720	2,720	2,720	13,316,889,875	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
a	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	420							DINAS PUPR	DINAS PUPR	1,500	1,500	500	500	14,766,849,870		APBD	DINAS PUPR
b	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbau)	Sambungan Rumah / SR	420							DINAS PUPR	DINAS PUPR		500	500				APBD	DINAS PUPR
c	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Rumah Tangga	75							DINAS PUPR	DINAS PUPR		250	250	250	620,000,000		APBD	DINAS PUPR
d	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan	Rumah Tangga	75										250	250	250				

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran						
c	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher digesa dan bangunan awal dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	450		300	300	300	6,274,413,000		APBD	DINAS PUPR					600	600	600	7,000,000,000		APBD	DINAS PUPR

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Kabupaten/Kota	3	4																
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Orang	2,475	1,400	1,400			16,160,000,000		APBD	DINAS PUPR	1,100	1,100			18,150,000,000			DINAS PUPR
a	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Sambungan Rumah / SR	420			400	400	15,500,000,000		APBD	DINAS PUPR			500	500	17,400,000,000			DINAS PUPR
b	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, tidak berbau)	Sambungan Rumah / SR	420			400	400						500	500					
c	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Rumah Tangga	75			250	250	660,000,000		APBD	DINAS PUPR			150	150	750,000,000			DINAS PUPR

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2027					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran		
d	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbau)	Rumah Tangga	75	2,750	250	250	2,750	7,500,000,000	DINAS PUPR	
				3,000	150	150	3,000	7,000,000,000		
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Orang	2,250	2,750	250	250	2,750	7,500,000,000	DINAS PUPR	
				3,000	150	150	3,000	7,000,000,000		
a	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	450	2,750	250	250	2,750	7,500,000,000	DINAS PUPR	
				3,000	150	150	3,000	7,000,000,000		

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2027					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Penerimaan Layanan Dasar		
c	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merubakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat wilayah bermukiman di wilayah Perdesaan Strategik Kecamatan Sidarejo Kabupaten Purwokerto kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan fasilitas digunkan Kloset leher angsa dan ban gunan be dapat mengun akan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	450	Realisasi	650	Realisasi	7,500,000,000	Penerimaan Layanan Dasar	DINAS PUPR	
				Mutu Layanan	650	Mutu Layanan	7,000,000,000	Penerimaan Layanan Dasar		
Inisiasi				Pencapaian SPM 2028					DINAS PUPR	
Inisiasi				Realisasi	600	Realisasi	7,000,000,000	Penerimaan Layanan Dasar		
Inisiasi				Pencapaian SPM 2028					DINAS PUPR	
Inisiasi				Realisasi	600	Realisasi	7,000,000,000	Penerimaan Layanan Dasar		

NO	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2029					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kabupaten/Kota										
1	Pemeruhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Orang	2,475	1,225	1,225			27,950,000,000		APBD	DINAS PUPR
a	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Sambungan Rumah / SR	420			525	525	19,500,000,000		APBD	DINAS PUPR
b	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Sambungan Rumah / SR	420			525	525				
c	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Rumah Tangga	75			175	175	950,000,000		APBD	DINAS PUPR
d	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Rumah Tangga	75			175	175				
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Orang	2,250	3,250	3,250			7,500,000,000		APBD	DINAS PUPR
a	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	450								
b	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi toilet leher tinggi dan bangunan bawah dilengkapi septic tanki stanjar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT, dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga									
c	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dan pedataran penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher tinggi dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	450			650	650	7,500,000,000		APBD	DINAS PUPR

Tabel 3.10 Renaksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kabupaten/Kota																		
1	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota;	Orang	817													875,000,000.00			
a)	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Rumah	0			0	0							0	0				
b)	Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana	Rumah	6			0	6	210,000,000		APBD	DINAS PUPR			25	25	875,000,000.00		APBD	DINAS PUPR
c)	Pemukiman kembali bagi korban bencana	Rumah	0			0	0							0	0				
d)	Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	Rumah	0			0	0							0	0				
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;	orang	132					280,000,000								350,000,000.00			
a)	Ada Relokasi Program Pemerintah	Rumah	0			8	8	280,000,000		APBD	DINAS PUPR			10	10	350,000,000.00		APBD	DINAS PUPR

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2027					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2028					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Kabupaten/Kota	3	4																
	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota;	Orang	817					875,000,000.00		APBD	DINAS PUPR					1,260,000,000.00		APBD	DINAS PUPR
a)	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Rumah	0			0	0							0	0				
b)	Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana	Rumah	6			25	25	875,000,000.00		APBD	DINAS PUPR			36	36	1,260,000,000.00		APBD	DINAS PUPR
c)	Pemukiman kembali bagi korban bencana	Rumah	0			0	0							0	0				
d)	Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	Rumah	0			0	0							0	0				
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;	orang	132					245,000,000.00		APBD	DINAS PUPR					175,000,000.00		APBD	DINAS PUPR
a)	Ada Relokasi Program Pemerintah	Rumah	0			7	7	245,000,000.00		APBD	DINAS PUPR			5	5	175,000,000.00		APBD	DINAS PUPR

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2025					Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran					
d)	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Transtribum gan, bat penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan dan Perku ada (pelayanan keru gan material dan pelayanan pengobatan)	dokumen	5		2	2	230,143,800	0	APBD	0	APBD	SATPOL PP	
e)	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian (keru sakan akibat p negakan p angkaran Perda dan Perkade rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	0		0	0	0	0	APBD	0	APBD	SATPOL PP	
f)	Warga negara yang memperoleh bantuan pelayanan pengo lama (kartologan pe lama ang be kena cide y sik gan akibat fi ne gan Perda dan Perka dan an ditim aklanjuti dengan mem bawa ke rum ah sakit/pusa kese masyaraka t bila hatan terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	orang	0		0	0	0	0	APBD	0	APBD	SATPOL PP	
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	orang	30	4,471	4,471	225,479,100			BPBD	4,471	APBD / APBN	BPBD / BNPB	
						294,410,000				4,471	APBD	SATPOL PP	

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2025					Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Inisiasi	Pencapaian SPM 2026					Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan			
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran					
a)	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen	1	1	1	194.410.000	1	1	194,410,000	BPBD	APBD					1	1	194,410,000	BPBD / BNPB	APBD / APBN	
b)	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	orang	25	25	25	31.069.100			31,069,100	BPBD	APBD					25	25	100,000,000	BPBD / BNPB	APBD / APBN	
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	orang	25	25	25	32.190.000	4,471	4,471	32,190,000	BPBD						4,471	4,471	517,050,000	BPBD / BNPB	APBD / APBN	
a)	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	unit	0	-	-	0			0	BPBD	APBD					1	1	150,000,000	BPBD / BNPB	APBD / APBN	
b)	Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)	orang	0	-	-	0			0	BPBD	APBD					1	1	150,000,000	BPBD / BNPB	APBD / APBN	
c)	Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi	orang	0	-	-	0			0	BPBD	APBD					23	23	100,000,000	BPBD / BNPB	APBD / APBN	
d)	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	orang	25	25	25	32.190.000			32,190,000	BPBD	APBD					25	25	65,650,000	BPBD / BNPB	APBD / APBN	
e)	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	kegiatan	0	-	-	0			0	BPBD	APBD					-	-	-	BPBD / BNPB	APBD / APBN	
f)	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	unit	6	-	-	0			0	BPBD	APBD					10	10	51,400,000	BPBD / BNPB	APBD / APBN	
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	orang	25	25	25	832.122.000	4,471	4,471	832,122,000	BPBD						4,471	4,471	916,569,750	BPBD / BNPB	APBD / APBN	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2027					Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Inisiasi	Pencapaian SPM 2028					Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Inisiasi
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kabupaten / Kota																		
1	Pelayanan Keamanan dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	orang	45	100	100			897,858,600		APBD	SATPOL PP	100	100			897,858,600		APBD	SATPOL PP
a	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	16			10	10	250,000,000	0	APBD	SATPOL PP		10	10	10	250,000,000	0	APBD	SATPOL PP
b	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SO Perda, Tim, tranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang asing, pelaksanaan patrol-patrol penting, pelaksanaan operasional patroli)	dokumen	2			9	9	117,714,800	0	APBD	SATPOL PP		9	9	9	117,714,800	0	APBD	SATPOL PP
c	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP (jumlah anggota kerlidung an, asyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang	30			130	130	300,000,000	0	APBD	SATPOL PP		130	130	130	300,000,000	0	APBD	SATPOL PP

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2027					Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Inisiasi	Pencapaian SPM 2028					Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Inisiasi									
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran												
a	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen	1		1	1	194,410,000		BPBD / BNPB	APBD / APBN			1	1	194,410,000		BPBD / BNPB	APBD / APBN			1	1	194,410,000		BPBD / BNPB	APBD / APBN		
b	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	orang	25		-	-	-		BPBD / BNPB	APBD / APBN			25	25	100,000,000		BPBD / BNPB	APBD / APBN			25	25	100,000,000		BPBD / BNPB	APBD / APBN		
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	orang	25	4,471	4,471	4,471	552,050,000		BPBD / BNPB	APBD / APBN			4,471	4,471	552,050,000		BPBD / BNPB	APBD / APBN			4,471	4,471	552,050,000		BPBD / BNPB	APBD / APBN		
a	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	unit	0		1	1	150,000,000		BPBD / BNPB	APBD / APBN			1	1	150,000,000		BPBD / BNPB	APBD / APBN			1	1	150,000,000		BPBD / BNPB	APBD / APBN		
b	Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)	orang	0		1	1	150,000,000		BPBD / BNPB	APBD / APBN			1	1	150,000,000		BPBD / BNPB	APBD / APBN			1	1	150,000,000		BPBD / BNPB	APBD / APBN		
c	Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi	orang	0		23	23	100,000,000		BPBD / BNPB	APBD / APBN			23	23	100,000,000		BPBD / BNPB	APBD / APBN			23	23	100,000,000		BPBD / BNPB	APBD / APBN		
d	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	orang	25		25	25	65,650,000		BPBD / BNPB	APBD / APBN			25	25	65,650,000		BPBD / BNPB	APBD / APBN			25	25	65,650,000		BPBD / BNPB	APBD / APBN		
e	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	kegiatan	0		6	6	35,000,000		BPBD / BNPB	APBD / APBN			6	6	35,000,000		BPBD / BNPB	APBD / APBN			6	6	35,000,000		BPBD / BNPB	APBD / APBN		
f	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	unit	6		10	10	51,400,000		BPBD / BNPB	APBD / APBN			10	10	51,400,000		BPBD / BNPB	APBD / APBN			10	10	51,400,000		BPBD / BNPB	APBD / APBN		

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2027					Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Inisiasi	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2028					Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Inisiasi											
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran					Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran														
c	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil amkar, kapal damkar mobil Penyelamatan, mobil tangki, mobil kemanan, dll), penyelamatan dan evakuasi helikopter tugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	unit	6		30	30	30	1,980,562,906	0	0	SATPOL PP	APBD / APBN		1	1	1	1	1,700,000,000	0	0	SATPOL PP	APBD / APBN			1	1	1	1	1,700,000,000	0	0
d	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/ Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam II)	orang	7		4	4	4	12,920,000	0	0	SATPOL PP	APBD		4	4	4	4	12,920,000	0	0	SATPOL PP	APBD			4	4	4	4	12,920,000	0	0
e	Pelayanan pemedaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layan an	54		50	50	50	80,000,000	0	0	SATPOL PP	APBD		50	50	50	50	80,000,000	0	0	SATPOL PP	APBD			50	50	50	50	80,000,000	0	0
f	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, sip, hilangnya trau, dan mengalami dampak sosial akibat kebakaran)	layan an	7		150	150	150	150,000,000	0	0	SATPOL PP	APBD		150	150	150	150	150,000,000	0	0	SATPOL PP	APBD			150	150	150	150	150,000,000	0	0

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2029						Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Kabupaten/Kota											
1	Pelayanan Ketertarikan dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	orang	45	100	100			B97,858,600		APBD	SATPOL PP	
a	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	16			10	10	250,000,000	0	APBD	SATPOL PP	
b	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	dokumen	2			9	9	117,714,800	0	APBD	SATPOL PP	
c	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan Masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang	30			130	130	300,000,000	0	APBD	SATPOL PP	
d	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	dokumen	5			2	2	230,143,800	0	APBD	SATPOL PP	
e	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	0			0	0		0	APBD	SATPOL PP	
f	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	orang	0			0	0		0	APBD	SATPOL PP	

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2029						Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Anggaran			
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	orang	30	4,471	4,471			300,000,000		APBD / APBN	BPBD / BNPB	
a	Penetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen	1			1		200,000,000		APBD / APBN	BPBD / BNPB	
b	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	orang	25			25		100,000,000		APBD / APBN	BPBD / BNPB	
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	orang	25	4,471	4,471			552,050,000		APBD / APBN	BPBD / BNPB	
a	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	unit	0			1		150,000,000		APBD / APBN	BPBD / BNPB	
b	Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)	orang	0			1		150,000,000		APBD / APBN	BPBD / BNPB	
c	Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi	orang	0			23		100,000,000		APBD / APBN	BPBD / BNPB	
d	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	orang	25			25		65,650,000		APBD / APBN	BPBD / BNPB	
e	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	kegiatan	0			6		35,000,000		APBD / APBN	BPBD / BNPB	
f	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	unit	6			10		51,400,000		APBD / APBN	BPBD / BNPB	
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	orang	25	4,471	4,471			1,055,000,000		APBD / APBN	BPBD / BNPB	
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	orang	54	250	250			2,036,861,000		APBD	SATPOL PP	
a	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan	54			80		91,870,000	0	APBD	SATPOL PP	
b	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen	1			1		2,071,000	0	APBD	SATPOL PP	

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2029					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
c	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh), mobil damkar, kapal damkar, mobil penyelamatan, mobil tangki air, mobil pemadam, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	unit	6		1	1	1,700,000,000	0	APBD	SATPOL PP	
d	Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/ Sumber Daya Manusia (jumlah aparaturnya SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	orang	7		4	4	12,920,000	0	APBD	SATPOL PP	
e	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	54		50	50	80,000,000	0	APBD	SATPOL PP	
f	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	7		150	150	150,000,000	0	APBD	SATPOL PP	

Tabel 3.12 Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial Kabupaten Sabu Raijua 2025-2029

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2025					Pencapaian SPM 2026					Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Inisiasi			
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Penerima Layanan Dasar	Realisasi				Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kabupaten/Kota		2024																
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti		38			95	95	316,973,566.67						120	1	724,014,583.33			
a	Layanan data dan pengaduan	Orang	38	-	-	95	95	80,846,666.67		APBD	DINSOS P3A	-	-	120	1	80,846,666.67		APBD	DINSOS P3A
b	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	32	-	-	95	95	6,012,400.00		APBD	DINSOS P3A	-	-	120	1	6,800,000.00		APBD	DINSOS P3A
c	Penyediaan permukiman	Orang	38	-	-	95	95	159,361,000.00		APBD DAN APBN	DINSOS P3A	-	-	120	1	322,860,000.00		APBD DAN APBN	DINSOS P3A
d	Penyediaan sandang	Orang	0	-	-	50	50	37,300,000.00		APBD	DINSOS P3A	-	-	120	1	89,520,000.00		APBD	DINSOS P3A
e	Penyediaan alat bantu	Orang	6	-	-	22	22	28,803,500.00		APBD	DINSOS P3A	-	-	120	1	138,283,250.00		APBD	DINSOS P3A
f	Penyediaan persediaan kesehatan	Orang	0	-	-	50	50	4,650,000.00		APBD	DINSOS P3A	-	-	120	1	11,160,000.00		APBD	DINSOS P3A
g	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	38	-	-	95	95	-		APBD	DINSOS P3A	-	-	120	120	20,400,000.00		APBD	DINSOS P3A
h	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	38	-	-	95	95	-		APBD	DINSOS P3A	-	-	120	120	20,400,000.00		APBD	DINSOS P3A
i	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	38	-	-	95	95	-		APBD	DINSOS P3A	-	-	120	120	7,426,666.67		APBD	DINSOS P3A
j	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	38	-	-	95	95	-		APBD	DINSOS P3A	-	-	120	120	1,700,000.00		APBD	DINSOS P3A

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2025					Pencapaian SPM 2026					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Instansi Pelaksana	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Instansi Pelaksana			
k	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	0	-	95	-	-	-	-	-	-	5	5	1,700,000.00	APBD	DINSOS P3A
l	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	-	0	-	-	-	-	-	-	5	5	1,700,000.00	APBD	DINSOS P3A
m	Layanan rujukan	Orang	0	-	0	-	-	-	-	-	-	5	5	21,218,000.00	APBD	DINSOS P3A
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti		26		67	200,566,066.67						80	80	276,031,333.33		
a	Layanan data dan pengaduan	Orang	26	-	67	80,846,666.67	-	-	-	-	-	80	80	80,846,666.67	APBD	DINSOS P3A
b	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	26	-	65	6,012,400.00	-	-	-	-	-	80	80	6,800,000.00	APBD	DINSOS P3A
c	Penyediaan permukiman	Orang	25	-	25	59,662,000.00	-	-	-	-	-	80	80	100,000,000.00	APBD DAN APBN	DINSOS P3A
d	Penyediaan sandang	Orang	0	-	25	25,000,000.00	-	-	-	-	-	80	80	20,000,000.00	APBD	DINSOS P3A
e	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	0	-	65	2,325,000.00	-	-	-	-	-	80	80	7,440,000.00	APBD	DINSOS P3A
f	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	26	-	65	-	-	-	-	-	-	80	80	13,600,000.00	APBD	DINSOS P3A
g	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	26	-	65	-	-	-	-	-	-	80	80	13,600,000.00	APBD	DINSOS P3A
h	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	26	-	65	-	-	-	-	-	-	80	80	7,426,666.67	APBD	DINSOS P3A

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2025					Pencapaian SPM 2026					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Inisiasi	Realisasi	Mutu Layanan	Penerima Layanan Dasar	Anggaran	Inisiasi	Realisasi	Mutu Layanan	Penerima Layanan Dasar	Anggaran		
i	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	26	-	65	65	-	-	-	-	80	80	1,700,000.00	APBD	DINSOS P3A
j	Pemberian pelayanan penerusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	0	-	0	0	-	-	-	-	5	5	1,700,000.00	APBD	DINSOS P3A
k	Pemberian pelayanan rujukan keluarga	Orang	0	-	0	0	-	-	-	-	5	5	1,700,000.00	APBD	DINSOS P3A
l	Layanan rujukan	Orang	1	-	2	2	-	26,720,000.00	APBD	DINSOS P3A	5	5	21,218,000.00	APBD	DINSOS P3A
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti		110	-	214	214	-	458,636,432.67			173	173	766,767,833.33		
a	Layanan data dan pengaduan	Orang	110	-	214	214	-	80,846,666.67	APBD	DINSOS P3A	173	173	80,846,666.67	APBD	DINSOS P3A
b	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	110	-	214	214	-	6,012,400.00	APBD	DINSOS P3A	173	173	6,800,000.00	APBD	DINSOS P3A
c	Penyediaan permakanan	Orang	110	-	214	214	-	344,897,366.00	APBD DAN APBN	DINSOS P3A	173	173	465,456,500.00	APBD DAN APBN	DINSOS P3A
d	Penyediaan sandang	Orang	0	-	50	50	-	-	APBD	DINSOS P3A	173	173	60,550,000.00	APBD	DINSOS P3A
e	Penyediaan alat bantu	Orang	0	-	18	18	-	22,230,000.00	APBD	DINSOS P3A	173	173	43,250,000.00	APBD	DINSOS P3A
f	Penyediaan perlengkapan kesehatan	Orang	0	-	50	50	-	4,650,000.00	APBD	DINSOS P3A	173	173	17,300,000.00	APBD	DINSOS P3A
g	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	110	-	214	214	-	-	APBD	DINSOS P3A	173	173	29,410,000.00	APBD	DINSOS P3A

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2025					Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Inisiasi	Pencapaian SPM 2026					Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Inisiasi			
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Penerima Layanan Dasar	Realisasi				Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
h	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Lanjut Usia terlantar	Orang	110	-	214	214	214	-	-	-	-	-	173	173	29,410,000.00	173	173	29,410,000.00	APBD	APBD	DINSOS P3A	DINSOS P3A
i	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepeemilikan NIK	Orang	110	-	214	214	214	-	-	-	-	-	173	173	7,426,666.67	173	173	7,426,666.67	APBD	APBD	DINSOS P3A	DINSOS P3A
j	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	110	-	214	214	214	-	-	-	-	-	173	173	1,700,000.00	173	173	1,700,000.00	APBD	APBD	DINSOS P3A	DINSOS P3A
k	Pemberian pelayanan pelurusan keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	0	-	0	0	0	-	-	-	-	-	5	5	1,700,000.00	5	5	1,700,000.00	APBD	APBD	DINSOS P3A	DINSOS P3A
l	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	-	0	0	0	-	-	-	-	-	5	5	1,700,000.00	5	5	1,700,000.00	APBD	APBD	DINSOS P3A	DINSOS P3A
m	Layanan rujukan	Orang	0	-	0	0	0	-	-	-	-	-	5	5	21,218,000.00	5	5	21,218,000.00	APBD	APBD	DINSOS P3A	DINSOS P3A
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti		0	-	1	1	1	-	-	-	-	-	3	3	43,945,500.00	3	3	43,945,500.00	APBD	APBD		
a	Layanan data dan pengaduan	Orang	0	-	1	1	1	-	-	-	-	-	3	3	15,000,000.00	3	3	15,000,000.00	APBD	APBD	DINSOS P3A	DINSOS P3A
b	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	0	-	1	1	1	-	-	-	-	-	3	3	2,100,000.00	3	3	2,100,000.00	APBD	APBD	DINSOS P3A	DINSOS P3A
c	Penyediaan permakanan	Orang	0	-	1	1	1	-	-	-	-	-	3	3	8,071,500.00	3	3	8,071,500.00	APBD	APBD	DINSOS P3A	DINSOS P3A
d	Penyediaan sandang	Orang	0	-	0	0	0	-	-	-	-	-	3	3	900,000.00	3	3	900,000.00	APBD	APBD	DINSOS P3A	DINSOS P3A
e	Penyediaan perbaikan kesehatan		0	-	0	0	0	-	-	-	-	-	3	3	279,000.00	3	3	279,000.00	APBD	APBD	DINSOS P3A	DINSOS P3A

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2025					Pencapaian SPM 2026					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Realisasi	Mutu Layanan			Realisasi	Anggaran	Inisiasi	
b	Penyediaan sandang	Orang	66		385	385		-		DINSOS P3A	APBD	DINSOS P3A	-	100	100	21,681,000.00		APBD	DINSOS P3A
c	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	19		385	385		21,681,000.00		DINSOS P3A	APBD	DINSOS P3A	-	100	100	10,000,000.00		APBD	DINSOS P3A
d	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	19		35	35		5,440,000.00		DINSOS P3A	APBD	DINSOS P3A	-	15	15	5,000,000.00		APBD	DINSOS P3A
e	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	96		385	385		16,485,000.00		DINSOS P3A	APBD	DINSOS P3A	-	100	100	13,785,000.00		APBD	DINSOS P3A

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2027					Pencapaian SPM 2028					Instansi Pelaksana					
				Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi		Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kabupaten/Kota		2024																
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti		38			120	120	709,852,908.33						120	120	778,206,399.17			
a	Layanan data dan pengaduan	Orang	38	-	-	120	120	5,000,000.00		APBD	DINSOS P3A	-	-	120	120	5,500,000.00		APBD	DINSOS P3A
b	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	32	-	-	120	120	7,480,000.00		APBD	DINSOS P3A	-	-	120	120	8,228,000.00		APBD	DINSOS P3A
c	Penyediaan permukiman	Orang	38	-	-	120	120	355,146,000.00		APBD DAN APBN	DINSOS P3A	-	-	120	120	390,660,600.00		APBD DAN APBN	DINSOS P3A
d	Penyediaan sandang	Orang	0	-	-	120	120	98,472,000.00		APBD	DINSOS P3A	-	-	120	120	108,319,200.00		APBD	DINSOS P3A
e	Penyediaan alat bantu	Orang	6	-	-	120	120	152,111,575.00		APBD	DINSOS P3A	-	-	120	120	167,322,732.50		APBD	DINSOS P3A
f	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	0	-	-	120	120	12,276,000.00		APBD	DINSOS P3A	-	-	120	120	13,503,600.00		APBD	DINSOS P3A
g	Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	38	-	-	120	120	22,440,000.00		APBD	DINSOS P3A	-	-	120	120	24,684,000.00		APBD	DINSOS P3A
h	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	38	-	-	120	120	22,440,000.00		APBD	DINSOS P3A	-	-	120	120	24,684,000.00		APBD	DINSOS P3A
i	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	38	-	-	120	120	8,169,333.33		APBD	DINSOS P3A	-	-	120	120	8,986,266.67		APBD	DINSOS P3A
j	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	38	-	-	120	120	1,700,000.00		APBD	DINSOS P3A	-	-	120	120	1,700,000.00		APBD	DINSOS P3A

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2027					Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Inisiasi	Pencapaian SPM 2028					Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Inisiasi							
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran										
k	Pemberian pelayanan penjurusan keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	0	-	5	5	-	1,700,000.00	APBD	DINSOS P3A	APBD	DINSOS P3A	-	5	5	-	1,700,000.00	APBD	DINSOS P3A	-	5	5	-	1,700,000.00	APBD	DINSOS P3A
l	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	-	5	5	-	1,700,000.00	APBD	DINSOS P3A	APBD	DINSOS P3A	-	5	5	-	1,700,000.00	APBD	DINSOS P3A	-	5	5	-	1,700,000.00	APBD	DINSOS P3A
m	Layanan rujukan	Orang	0	-	5	5	-	21,218,000.00	APBD	DINSOS P3A	APBD	DINSOS P3A	-	5	5	-	21,218,000.00	APBD	DINSOS P3A	-	5	5	-	21,218,000.00	APBD	DINSOS P3A
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti		26		80	80		217,071,333.33						80	80		236,146,666.67									
a	Layanan data dan pengaduan	Orang	26	-	80	80	-	5,000,000.00	APBD	DINSOS P3A	APBD	DINSOS P3A	-	80	80	-	5,500,000.00	APBD	DINSOS P3A	-	80	80	-	5,500,000.00	APBD	DINSOS P3A
b	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	26	-	80	80	-	7,480,000.00	APBD	DINSOS P3A	APBD	DINSOS P3A	-	80	80	-	8,228,000.00	APBD	DINSOS P3A	-	80	80	-	8,228,000.00	APBD	DINSOS P3A
c	Penyediaan permakanan	Orang	25	-	80	80	-	110,000,000.00	APBD DAN APBN	DINSOS P3A	APBD DAN APBN	DINSOS P3A	-	80	80	-	121,000,000.00	APBD DAN APBN	DINSOS P3A	-	80	80	-	121,000,000.00	APBD DAN APBN	DINSOS P3A
d	Penyediaan sandang	Orang	0	-	80	80	-	22,000,000.00	APBD	DINSOS P3A	APBD	DINSOS P3A	-	80	80	-	24,200,000.00	APBD	DINSOS P3A	-	80	80	-	24,200,000.00	APBD	DINSOS P3A
e	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	0	-	80	80	-	8,184,000.00	APBD	DINSOS P3A	APBD	DINSOS P3A	-	80	80	-	9,002,400.00	APBD	DINSOS P3A	-	80	80	-	9,002,400.00	APBD	DINSOS P3A
f	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	26	-	80	80	-	14,960,000.00	APBD	DINSOS P3A	APBD	DINSOS P3A	-	80	80	-	16,456,000.00	APBD	DINSOS P3A	-	80	80	-	16,456,000.00	APBD	DINSOS P3A
g	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	26	-	80	80	-	14,960,000.00	APBD	DINSOS P3A	APBD	DINSOS P3A	-	80	80	-	16,456,000.00	APBD	DINSOS P3A	-	80	80	-	16,456,000.00	APBD	DINSOS P3A
h	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	26	-	80	80	-	8,169,333.33	APBD	DINSOS P3A	APBD	DINSOS P3A	-	80	80	-	8,986,266.67	APBD	DINSOS P3A	-	80	80	-	8,986,266.67	APBD	DINSOS P3A

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2027					Pencapaian SPM 2028					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Penerima Layanan Dasar	Realisasi			Mutu Layanan
i	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	26	-	80	80	80	1,700,000.00	APBD	DINSOS P3A	-	80	80	1,700,000.00	APBD	DINSOS P3A
j	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	0	-	5	5	5	1,700,000.00	APBD	DINSOS P3A	-	5	5	1,700,000.00	APBD	DINSOS P3A
k	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	-	5	5	5	1,700,000.00	APBD	DINSOS P3A	-	5	5	1,700,000.00	APBD	DINSOS P3A
l	Layanan rujukan	Orang	1	-	5	5	5	21,218,000.00	APBD	DINSOS P3A	-	5	5	21,218,000.00	APBD	DINSOS P3A
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti		110		173	173	173	756,881,483.33				173	173	829,937,831.67		
a	Layanan data dan pengaduan	Orang	110	-	173	173	173	5,000,000.00	APBD	DINSOS P3A	-	173	173	5,500,000.00	APBD	DINSOS P3A
b	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	110	-	173	173	173	7,480,000.00	APBD	DINSOS P3A	-	173	173	8,228,000.00	APBD	DINSOS P3A
c	Penyediaan permakanan	Orang	110	-	173	173	173	512,002,150.00	APBD DAN APBN	DINSOS P3A	-	173	173	563,202,365.00	APBD DAN APBN	DINSOS P3A
d	Penyediaan sandang	Orang	0	-	173	173	173	66,605,000.00	APBD	DINSOS P3A	-	173	173	73,265,500.00	APBD	DINSOS P3A
e	Penyediaan alat bantu	Orang	0	-	173	173	173	47,575,000.00	APBD	DINSOS P3A	-	173	173	52,332,500.00	APBD	DINSOS P3A
f	Penyediaan perlengkapan kesehatan	Orang	0	-	173	173	173	19,030,000.00	APBD	DINSOS P3A	-	173	173	20,933,000.00	APBD	DINSOS P3A
g	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	110	-	173	173	173	32,351,000.00	APBD	DINSOS P3A	-	173	173	35,586,100.00	APBD	DINSOS P3A
h	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Lanjut Usia tertantar	Orang	110	-	173	173	173	32,351,000.00	APBD	DINSOS P3A	-	173	173	35,586,100.00	APBD	DINSOS P3A

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2027					Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Inisiasi	Pencapaian SPM 2028					Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Inisiasi					
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran								
i	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	110	-	173	173	173	8,169,333.33	DINSOS P3A	APBD	-	173	173	173	8,986,266.67	DINSOS P3A	APBD	-	173	173	173	8,986,266.67	DINSOS P3A	APBD
j	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	110	-	173	173	173	1,700,000.00	DINSOS P3A	APBD	-	173	173	173	1,700,000.00	DINSOS P3A	APBD	-	173	173	173	1,700,000.00	DINSOS P3A	APBD
k	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	0	-	5	5	5	1,700,000.00	DINSOS P3A	APBD	-	5	5	5	1,700,000.00	DINSOS P3A	APBD	-	5	5	5	1,700,000.00	DINSOS P3A	APBD
l	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	-	5	5	5	1,700,000.00	DINSOS P3A	APBD	-	5	5	5	1,700,000.00	DINSOS P3A	APBD	-	5	5	5	1,700,000.00	DINSOS P3A	APBD
m	Layanan rujukan	Orang	0	-	5	5	5	21,218,000.00	DINSOS P3A	APBD	-	5	5	5	21,218,000.00	DINSOS P3A	APBD	-	5	5	5	21,218,000.00	DINSOS P3A	APBD
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti		0	-	3	3	3	30,880,550.00			-	3	3	3	32,209,105.00			-	3	3	3	32,209,105.00		
a	Layanan data dan pengaduan	Orang	0	-	3	3	3	800,000.00	DINSOS P3A	APBD	-	3	3	3	880,000.00	DINSOS P3A	APBD	-	3	3	3	880,000.00	DINSOS P3A	APBD
b	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	0	-	3	3	3	2,310,000.00	DINSOS P3A	APBD	-	3	3	3	2,541,000.00	DINSOS P3A	APBD	-	3	3	3	2,541,000.00	DINSOS P3A	APBD
c	Penyediaan permakanan	Orang	0	-	3	3	3	8,878,650.00	DINSOS P3A	APBD	-	3	3	3	9,766,515.00	DINSOS P3A	APBD	-	3	3	3	9,766,515.00	DINSOS P3A	APBD
d	Penyediaan sandiung	Orang	0	-	3	3	3	990,000.00	DINSOS P3A	APBD	-	3	3	3	1,089,000.00	DINSOS P3A	APBD	-	3	3	3	1,089,000.00	DINSOS P3A	APBD
e	Penyediaan perbekalan kesehatan		0	-	3	3	3	306,900.00	DINSOS P3A	APBD	-	3	3	3	337,590.00	DINSOS P3A	APBD	-	3	3	3	337,590.00	DINSOS P3A	APBD
f	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	0	-	3	3	3	1,020,000.00	DINSOS P3A	APBD	-	3	3	3	1,020,000.00	DINSOS P3A	APBD	-	3	3	3	1,020,000.00	DINSOS P3A	APBD

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2027					Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Inisiasi	Pencapaian SPM 2028					Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Inisiasi						
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran									
g	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	0	-	3	3	3	1,020,000.00	DINSOS P3A	APBD		-	3	3	1,020,000.00	DINSOS P3A	APBD		-	3	3	1,020,000.00	DINSOS P3A	APBD	
h	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	Orang	0	-	3	3	3	1,020,000.00	DINSOS P3A	APBD		-	3	3	1,020,000.00	DINSOS P3A	APBD		-	3	3	1,020,000.00	DINSOS P3A	APBD	
i	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	-	3	3	3	1,020,000.00	DINSOS P3A	APBD		-	3	3	1,020,000.00	DINSOS P3A	APBD		-	3	3	1,020,000.00	DINSOS P3A	APBD	
j	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	0	-	3	3	3	1,020,000.00	DINSOS P3A	APBD		-	3	3	1,020,000.00	DINSOS P3A	APBD		-	3	3	1,020,000.00	DINSOS P3A	APBD	
k	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	-	3	3	3	1,020,000.00	DINSOS P3A	APBD		-	3	3	1,020,000.00	DINSOS P3A	APBD		-	3	3	1,020,000.00	DINSOS P3A	APBD	
l	Layanan rujukan	Orang	0	-	3	3	3	11,475,000.00	DINSOS P3A	APBD		-	3	3	11,475,000.00	DINSOS P3A	APBD		-	3	3	11,475,000.00	DINSOS P3A	APBD	
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		96		100	100	100	84,508,600.00					100	100	92,959,460.00					100	100	92,959,460.00			
a	Penyediaan permakanan	Orang	96	-	100	100	100	28,996,000.00	DINSOS P3A	APBD		-	100	100	31,895,600.00	DINSOS P3A	APBD		-	100	100	31,895,600.00	DINSOS P3A	APBD	
b	Penyediaan sandang	Orang	66	-	100	100	100	23,849,100.00	DINSOS P3A	APBD		-	100	100	26,234,010.00	DINSOS P3A	APBD		-	100	100	26,234,010.00	DINSOS P3A	APBD	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SFM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2027					Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Inisiasi	Pencapaian SPM 2028					Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan									
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Penerima Layanan Dasar	Realisasi			Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran						
c	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	19	-	100	100	100	11,000,000.00	APBD		DINSOS P3A	APBD		-	100	100	100	12,100,000.00	APBD	DINSOS P3A	APBD		-	100	100	DINSOS P3A	APBD
d	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	19	-	15	15	15	5,500,000.00	APBD		DINSOS P3A	APBD		-	15	15	15	6,050,000.00	APBD	DINSOS P3A	APBD		-	100	100	DINSOS P3A	APBD
e	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	96	-	100	100	100	15,163,500.00	APBD		DINSOS P3A	APBD		-	100	100	100	16,679,850.00	APBD	DINSOS P3A	APBD		-	100	100	DINSOS P3A	APBD

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2029						Inisiasi	Sumber Perencanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				
1	2	3	4	5	6	7	8	9.00	10	11	12	
	Kabupaten/Kota											
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	38				120	120	853,395,239.08				
a	Layanan data dan pengacuan	Orang	38	-	-	120	120	6,050,000.00		APBD	DINSOS P3A	
b	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	32	-	-	120	120	9,050,800.00		APBD	DINSOS P3A	
c	Penyediaan permukiman	Orang	38	-	-	120	120	429,726.660.00		APBD DAN APBN	DINSOS P3A	
d	Penyediaan sandang	Orang	0	-	-	120	120	119,151,120.00		APBD	DINSOS P3A	
e	Penyediaan alat bantu	Orang	6	-	-	120	120	184,055,005.75		APBD	DINSOS P3A	
f	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	0	-	-	120	120	14,853,960.00		APBD	DINSOS P3A	
g	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	38	-	-	120	120	27,152,400.00		APBD	DINSOS P3A	
h	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	38	-	-	120	120	27,152,400.00		APBD	DINSOS P3A	
i	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan / Bukti kepemilikan NIK	Orang	38	-	-	120	120	9,884,893.33		APBD	DINSOS P3A	
j	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	38	-	-	120	120	1,700,000.00		APBD	DINSOS P3A	
k	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga / Bukti keberadaan keluarga	Orang	0	-	-	5	5	1,700,000.00		APBD	DINSOS P3A	
l	Pemberian pelayanan reumifikasi keluarga	Orang	0	-	-	5	5	1,700,000.00		APBD	DINSOS P3A	
m	Layanan rujukan	Orang	0	-	-	5	5	21,218,000.00		APBD	DINSOS P3A	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2029						Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Anggaran			
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti		26			80	80	257,129,533.33				
a	Layanan data dan pengaduan	Orang	26	-	-	80	80	6,050,000.00		APBD	DINSOS P3A	
b	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	26	-	-	80	80	9,050,800.00		APBD	DINSOS P3A	
c	Penyediaan permukiman	Orang	25	-	-	80	80	133,100,000.00		APBD DAN APBN	DINSOS P3A	
d	Penyediaan sandang	Orang	0	-	-	80	80	26,620,000.00		APBD	DINSOS P3A	
e	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	0	-	-	80	80	9,902,640.00		APBD	DINSOS P3A	
f	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	26	-	-	80	80	18,101,600.00		APBD	DINSOS P3A	
g	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	26	-	-	80	80	18,101,600.00		APBD	DINSOS P3A	
h	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	26	-	-	80	80	9,884,893.33		APBD	DINSOS P3A	
i	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	26	-	-	80	80	1,700,000.00		APBD	DINSOS P3A	
j	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	0	-	-	5	5	1,700,000.00		APBD	DINSOS P3A	
k	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	-	-	5	5	1,700,000.00		APBD	DINSOS P3A	
l	Layanan rujukan	Orang	1	-	-	5	5	21,218,000.00		APBD	DINSOS P3A	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti		110			173	173	910,299,814.83				
a	Layanan data dan pengaduan	Orang	110	-	-	173	173	6,050,000.00		APBD	DINSOS P3A	
b	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	110	-	-	173	173	9,050,800.00		APBD	DINSOS P3A	
c	Penyediaan permukiman	Orang	110	-	-	173	173	619,522,601.50		APBD DAN APBN	DINSOS P3A	
d	Penyediaan sandang	Orang	0	-	-	173	173	80,592,050.00		APBD	DINSOS P3A	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2029						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Inisiasi		
e	Penyediaan alat bantu	Orang	0	-	-	173	173	57,565,750.00	APBD	DINSOS P3A	
f	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	0	-	-	173	173	23,026,300.00	APBD	DINSOS P3A	
g	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	110	-	-	173	173	39,144,710.00	APBD	DINSOS P3A	
h	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Lanjut Usia terfatar	Orang	110	-	-	173	173	39,144,710.00	APBD	DINSOS P3A	
i	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	110	-	-	173	173	9,884,893.33	APBD	DINSOS P3A	
j	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	110	-	-	173	173	1,700,000.00	APBD	DINSOS P3A	
k	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	0	-	-	5	5	1,700,000.00	APBD	DINSOS P3A	
l	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	-	-	5	5	1,700,000.00	APBD	DINSOS P3A	
m	Layanan rujukan	Orang	0	-	-	5	5	21,218,000.00	APBD	DINSOS P3A	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Orang	0	-	-	3	3	33,670,515.50			
a	Layanan data dan gangguan	Orang	0	-	-	3	3	968,000.00	APBD	DINSOS P3A	
b	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	0	-	-	3	3	2,795,100.00	APBD	DINSOS P3A	
c	Penyediaan permakanan	Orang	0	-	-	3	3	10,743,166.50	APBD	DINSOS P3A	
d	Penyediaan sandang	Orang	0	-	-	3	3	1,197,900.00	APBD	DINSOS P3A	
e	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	0	-	-	3	3	371,349.00	APBD	DINSOS P3A	
f	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	0	-	-	3	3	1,020,000.00	APBD	DINSOS P3A	
g	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	0	-	-	3	3	1,020,000.00	APBD	DINSOS P3A	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2029						Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				
h	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	Orang	0	-	3	3	3	1,020,000.00		APBD	DINSOS P3A	
i	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	-	3	3	3	1,020,000.00		APBD	DINSOS P3A	
j	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	0	-	3	3	3	1,020,000.00		APBD	DINSOS P3A	
k	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	-	3	3	3	1,020,000.00		APBD	DINSOS P3A	
l	Layanan rujukan	Orang	0	-	3	3	3	11,475,000.00		APBD	DINSOS P3A	
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota		96		100	100	100	102,255,406.00				
a	Penyediaan permakanan	Orang	96	-	100	100	100	35,085,160.00		APBD	DINSOS P3A	
b	Penyediaan sandang	Orang	66	-	100	100	100	28,857,411.00		APBD	DINSOS P3A	
c	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	19	-	100	100	100	13,310,000.00		APBD	DINSOS P3A	
d	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	19	-	15	15	15	6,655,000.00		APBD	DINSOS P3A	
e	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	96	-	100	100	100	18,347,835.00		APBD	DINSOS P3A	

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM

4.1 Pemantauan dan Evaluasi SPM

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan Dasar SPM di Daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.
2. Pelaksanaan Kegiatan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
3. Penggunaan sumber daya, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.
4. Penyampaian perkembangan hasil, pemantauan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.

5. Pelaku kegiatan, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. Ketaatan/*compliance*, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Pemeriksaan/*auditing*, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
- c. Laporan/*accounting*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu "menghitung" hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
- d. Penjelasan/*explanation*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kabupaten Sabu Raijua, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di cross-check apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

- a. Kebijakan Daerah. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:
 1. Apa saja kebijakan Daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
 2. Apakah kebijakan Daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
 3. Adakah diantara kebijakan yang dibuat Pemerintah Daerah bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
 4. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
 - a) Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?
 - b) Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?

- c) Bagaimana Daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar terberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
 - d) Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?
- b. Koordinasi, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:
- 1. Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
 - 2. Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan Perangkat Daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah disektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
 - 3. Jika ada kerja sama Daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - 4. Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (Daerah dan Pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - 5. Bagaimana hubungan Pemerintah Daerah dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di Daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- c. Manajemen Kerja, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:
- 1. Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - 2. Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat Penerapan SPM jadi terhambat?
 - 3. Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?
- d. Pendanaan. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:
- 1. Apakah Pemerintah Daerah memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
 - 2. Bagaimana Pemerintah Daerah menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamakan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
 - 3. Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara paralel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannya? Sebaliknya, ataukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? Perangkat Daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?

4. Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? dan mengapa?
5. Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?
6. Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang termanfaatkan, serta berimbang pada berapa banyak warga yang terlayani?
7. Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

Tabel 4.1 Evaluasi pencapaian indikator SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, stakeholder terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

4.2 Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur, Bupati-Walikota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh Daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

- a. Indeks Pencapaian SPM. Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 - 1) Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;
 - 2) Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan;
 - 3) SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- b. Anggaran SPM. Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 - 1) Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?
 - 2) Bagaimana SPM diposisikan?
 - 3) Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM?
 - 4) Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target output pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?
 - 5) Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?
- c. Permasalahan SPM. Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 - 1) Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di Daerah?
 - 2) Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM?
 - 3) Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Capaian pada tiap bidang SPM di Kabupaten Sabu Raijua masih rendah diakibatkan belum terintegrasinya SPM ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah. Renaksi Penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, memuat terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan, penerima dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan SPM selama 5 tahun ke depan.

5.2 Saran

1. Perlu sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, untuk pemahaman terhadap kewenangan pemenuhan pencapaian SPM di Kabupaten Sabu Raijua.
2. Perlu penguatan tim Penerapan SPM Kabupaten Sabu Raijua berkaitan dengan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.
3. Tim Penerapan SPM Kabupaten Sabu Raijua secepatnya mengoordinasikan rencana aksi daerah yang diprakarsai oleh Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, guna pemenuhan SPM dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan penganggaran.
4. Perlu bimbingan kepada tim Penerapan SPM dalam pelaporan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, pelaporan secara triwulanan yang dilaporkan ke dalam aplikasi e-SPM yaitu: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>.
5. Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan SPM melalui kerja sama *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian Renaksi Penerapan SPM ini dibuat, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan Indeks pencapaian SPM di Kabupaten Sabu Raijua.

